

**SERI ANALISIS
PEMBANGUNAN WILAYAH**

**PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

2015



**ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1.	KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH	1
1.1.	PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA	1
1.2.	KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA	4
2.	ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH	7
2.1.	ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA	8
2.1.1.	Pendidikan	8
2.1.2.	Kesehatan	10
2.1.3.	Perumahan	11
2.1.4.	Mental/Karakter	12
2.2.	ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN	14
2.2.1.	Pengembangan Sektor Pangan	14
2.2.2.	Pengembangan Sektor Energi	19
2.2.3.	Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan	20
2.2.4.	Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri	22
2.3.	ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	26
2.3.1.	Pusat Pertumbuhan Wilayah	26
2.3.1.1	Kawasan Ekonomi Khusus	26
2.3.2.	Kesenjangan intra wilayah	28
3.	ISU STRATEGIS WILAYAH	29
4.	REKOMENDASI KEBIJAKAN	39
5.	PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016	39



ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.

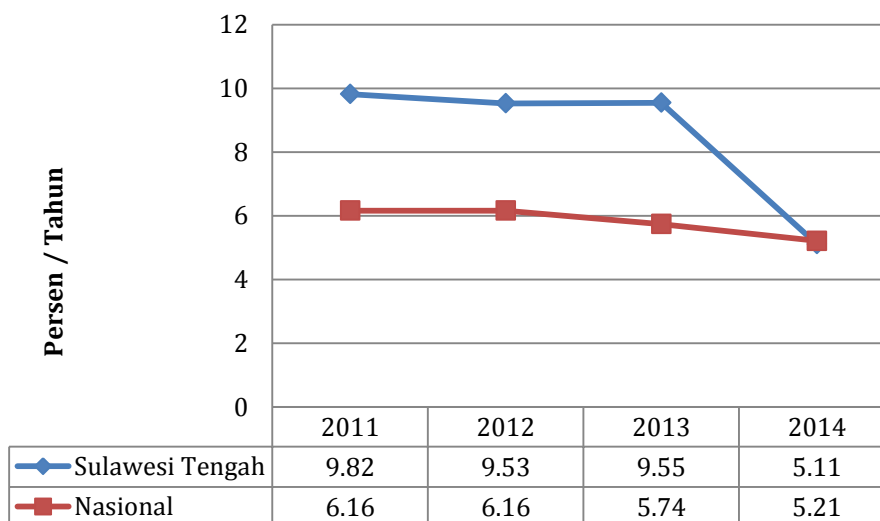
1.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Sulawesi Tengah tahun 2011 – 2014 cenderung mengalami penurunan terutama pada tahun 2014 (Gambar 1). Pada tahun 2011 – 2013 pertumbuhan ekonomi menurun dari 9,82 persen pada tahun 2010 menjadi 9,55 persen pada tahun 2013, kemudian menurun tajam menjadi 5,11 pada tahun 2014. Selama kurun waktu tersebut laju pertumbuhan rata-rata Sulawesi Tengah sebesar 8,50 persen, berada di atas rata-rata nasional 5,9 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah turut didukung oleh pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah di wilayah ini. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel, dengan hasil perkebunan yang dominan di provinsi ini yaitu kakao.

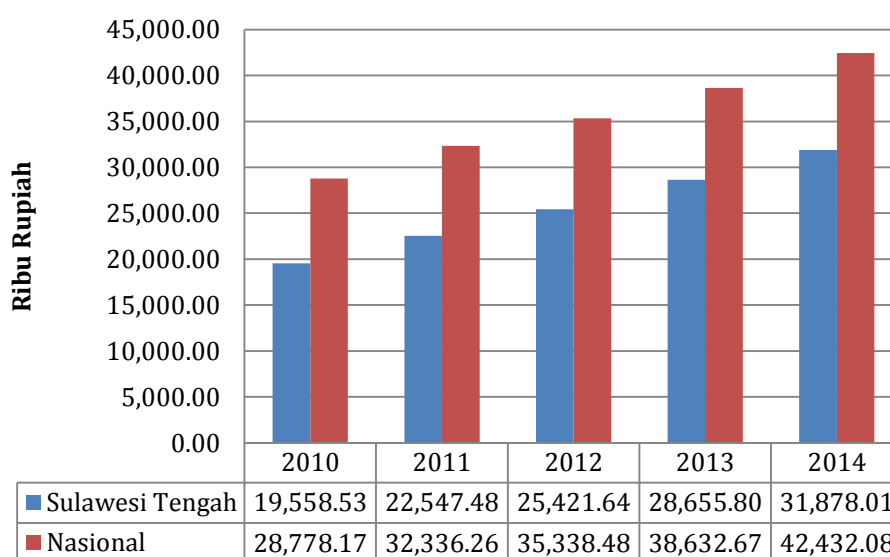
Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan



Sumber: BPS, 2014

Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat, namun masih berada di bawah pendapatan per kapita nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Sulawesi Tengah relatif lebih rendah secara nasional. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah dan PDB Nasional sebesar 67,96 persen, maka pada tahun 2014 rasionya meningkat menjadi 75,13 persen (Gambar 2). Apabila pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda jauh, kinerja rata-rata Sulawesi Tengah lebih baik daripada provinsi lain. Besarnya PDRB perkapita yang menunjukkan tingkat kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Tengah relatif meningkat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

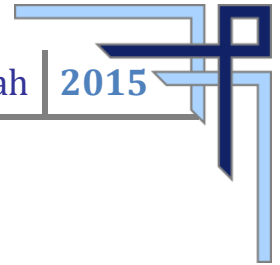
Gambar 2
PDRB Per Kapita ADHB



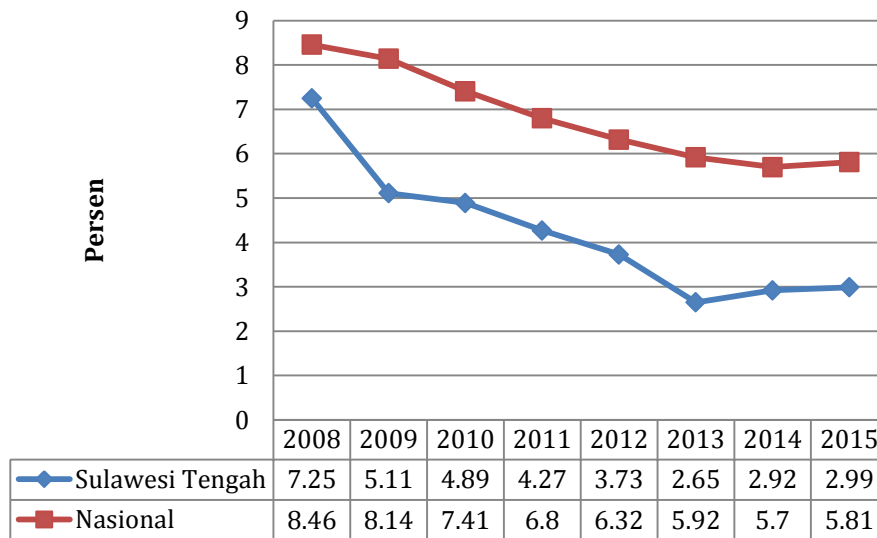
Sumber: BPS, 2013

1.1.2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2008-2015 berkurang sebesar 4,26 persen, dan berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun pada yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2008-2015 masih mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. (Gambar 3). Namun demikian tingginya tingkat pengangguran di tengah pendapatan per kapita yang moderat mengindikasikan bahwa pengangguran tersebut kemungkinan besar merupakan tenaga yang tidak terdidik karena tidak berimbas langsung pada rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.



Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

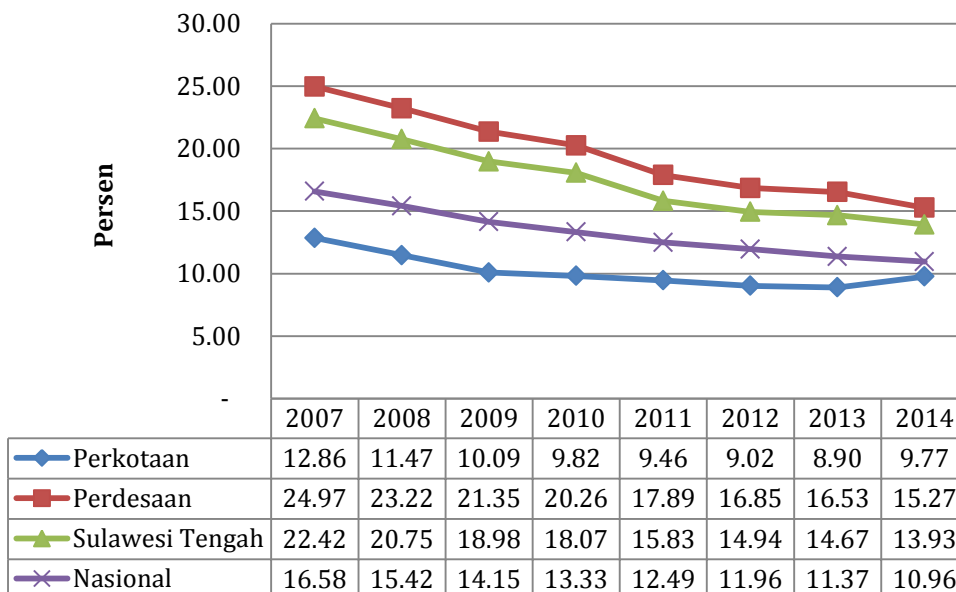


Sumber: BPS, 2015

1.1.3. Pengurangan Kemiskinan

Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Selama kurun waktu 2007-2014 persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah telah berkurang sebesar 8,52 persen namun kemiskinan di wilayah ini masih berada di atas rata-rata kemiskinan di tingkat nasional (Gambar 4). Untuk mengurangi kemiskinan di perdesaan diperlukan upaya dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi rakyat miskin.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

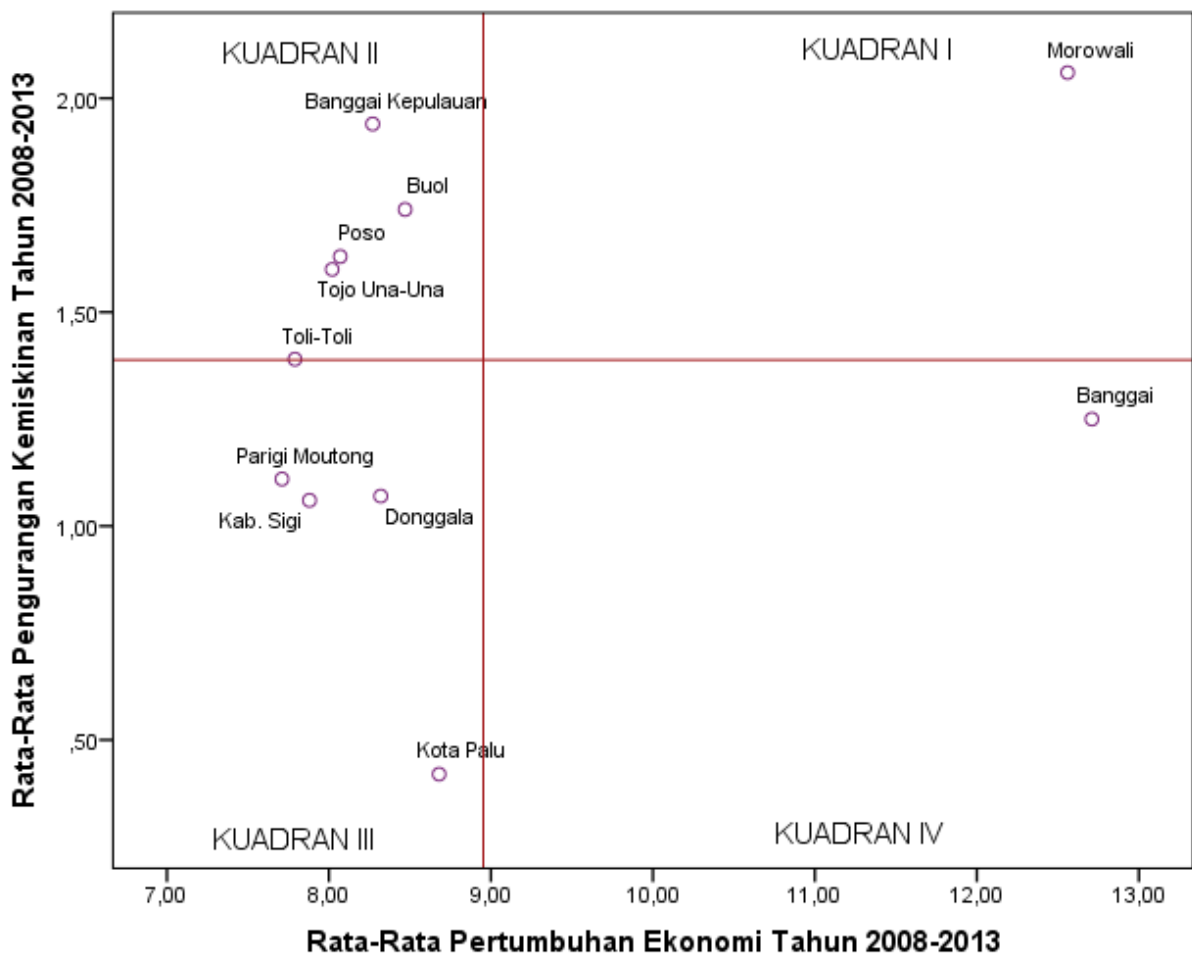
1.2. KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Morowali merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Kedua, Kabupaten Banggai Kepulauan, Buol, Poso, Tojo Una una termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Toli toli Donggala Sigi, Parigi Moutong, dan Kota Palu terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Banggai terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

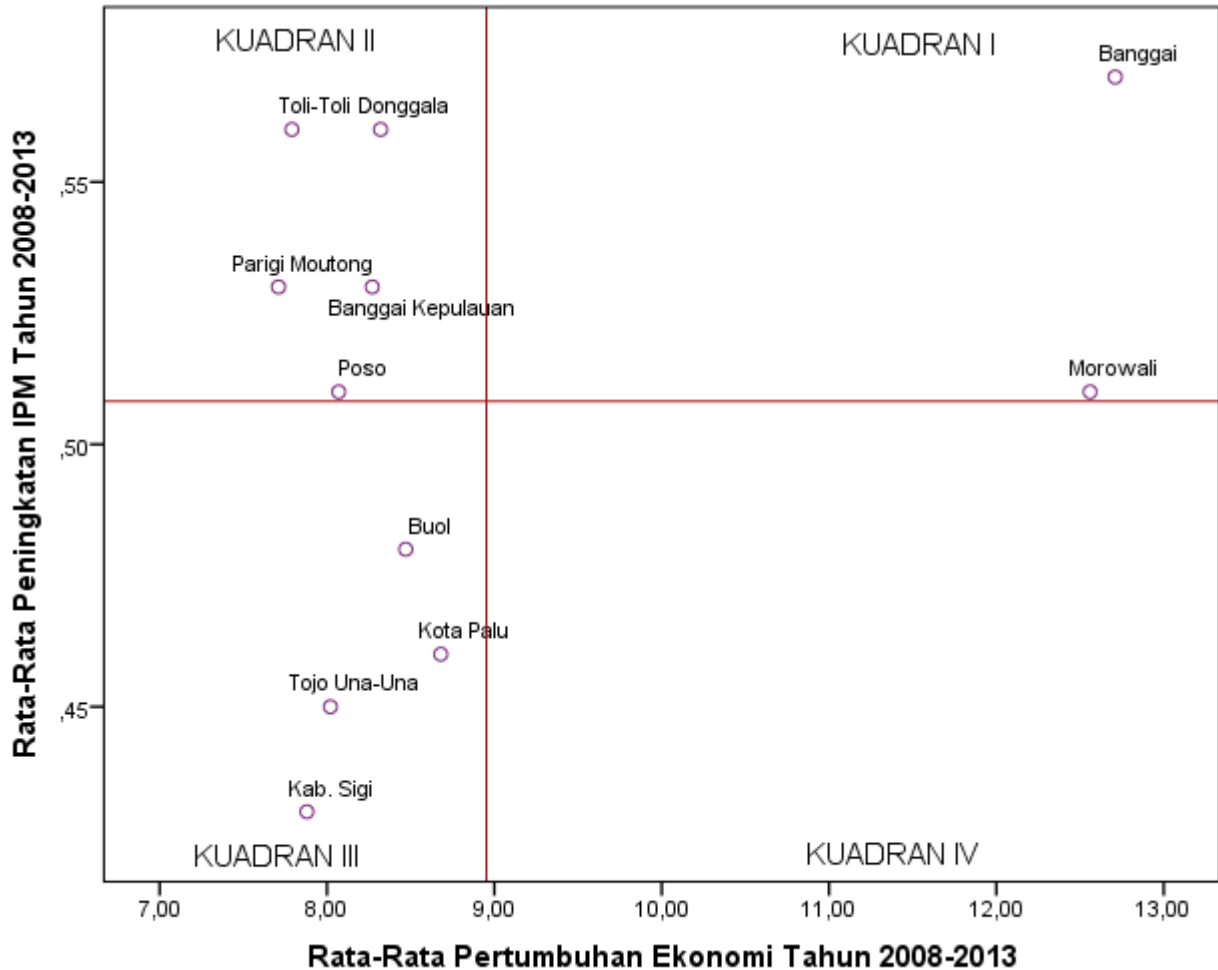
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2013. *Pertama*, Kabupaten Banggai dan Morowali terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Toli toli, Donggala, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Poso yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Buol, Tojo Una una, Sigi, dan Kota Palu terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus

bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

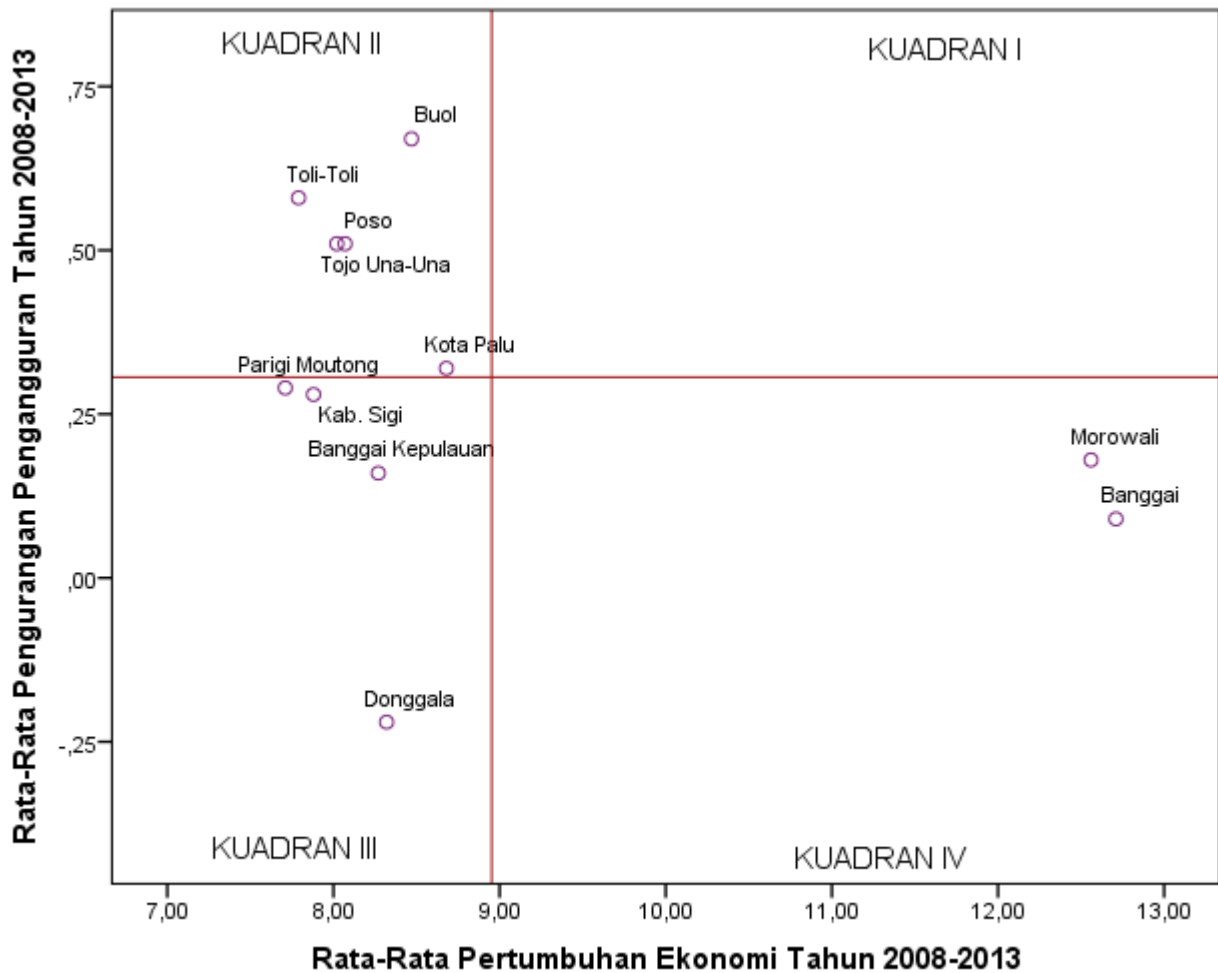
1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2013. *Pertama*, Kabupaten Buol, Toli toli, Poso, Tojo Una una, dan Kota Palu terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Banggai Kepulauan, dan Donggala terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Ketiga, Kabupaten Morowali dan Banggai terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

2. ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah berkelanjutan bersifat multidimensi sehingga diperlukan analisis pembangunan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah publik. Analisis pembangunan wilayah didasarkan pada dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan.

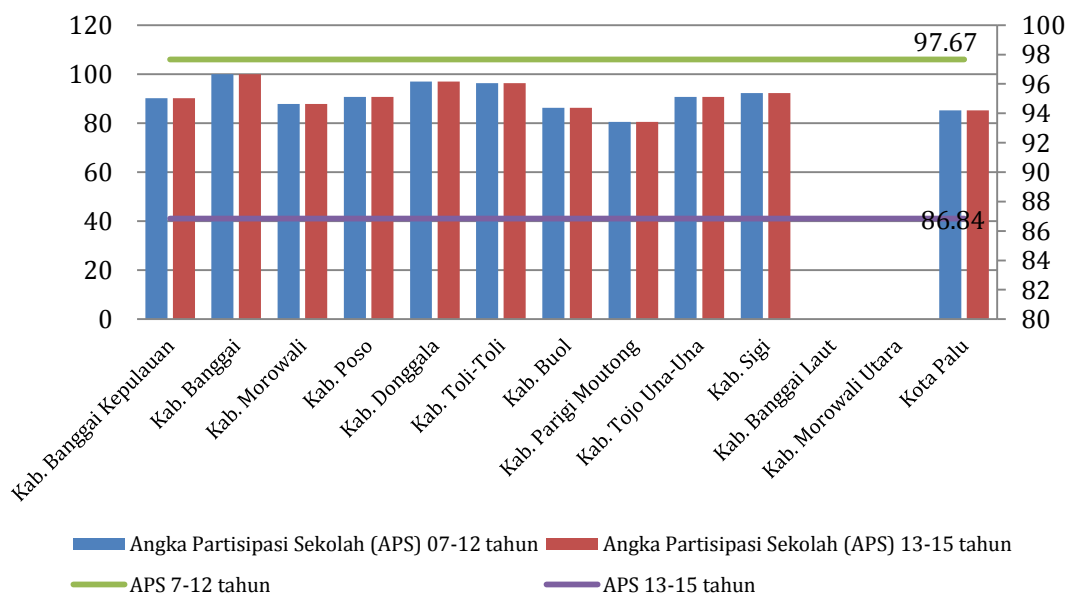
2.1. ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan sosial ekonomi penduduk suatu daerah. Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Pendidikan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan ketrampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah.

Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Sulawesi Tengah belum berkembang, terutama apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikan di Pulau Jawa. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah tidak merata (Gambar 8). Rata-rata APS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013 sebesar 97,67 persen untuk usia 7-12 tahun dan 86,84 persen untuk usia 13-15 tahun. Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan APS terendah meliputi Kabupaten Parigi Moutong (80,45 persen), Kab. Buol (86,2 persen), dan Kab. Morowali (87,81 persen). Semakin tinggi jenjang pendidikan di Sulawesi Tengah, semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Hal ini menggambarkan masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan dasar di Sulawesi Tengah belum terpenuhi karena kekurangan tenaga pendidik dan layanan pendidikan lainnya. Jumlah tenaga guru pada seluruh tingkatan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang sehingga mempengaruhi perbaikan mutu dan kualitas anak didik yang ada di daerah ini. Jumlah tenaga guru dari semua tingkatan di Sulawesi Tengah masih sedikit dan tersebar di seluruh kabupaten.

Gambar 8
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013 (Persen)



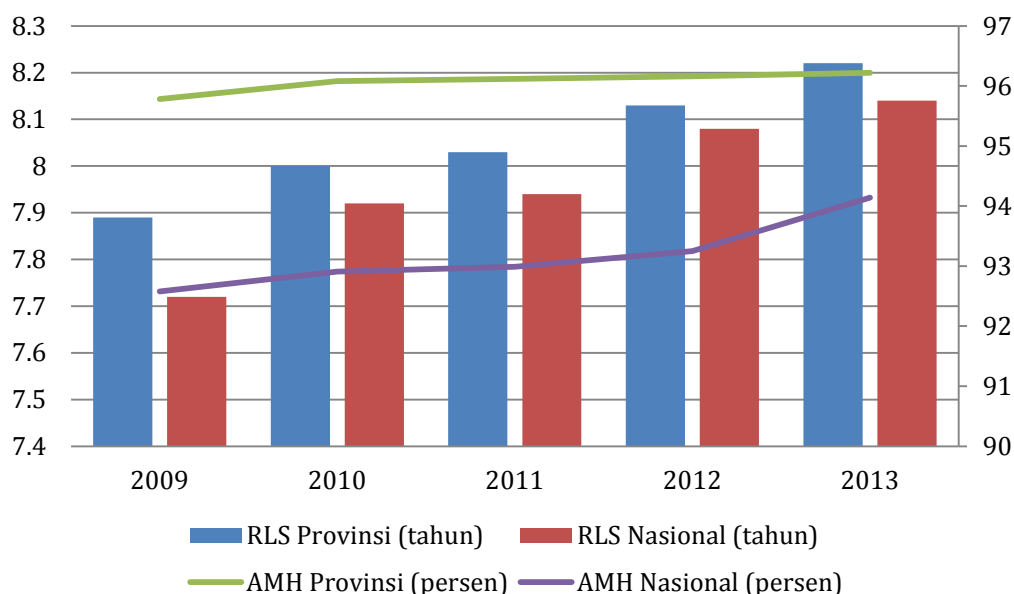
* Kab. Banggai Laut dan Morowali Utara data tidak tersedia

Sumber: BPS, 2013

Rendahnya capaian APS pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH) sebagai indikator keberhasilan pembangunan oleh MDGs di Provinsi Sulawesi Tengah (Gambar 9). RLS di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 8 tahun, setara dengan dari RLS nasional. AMH Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2009-2013 berkisar pada angka 95-96 persen dan meningkat setiap tahunnya bahkan lebih tinggi daripada AMH nasional yang yang besarnya 91 persen di tahun 2009 menjadi 94 persen di tahun 2013. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan merupakan faktor penting tercapainya mutu pendidikan yang baik. Di sisi lain rasio guru dan murid juga berperan dalam meningkatkan kualitas anak didik.

Rendahnya AMH dan RLS di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain disebabkan kondisi Sulawesi Tengah dengan aksesibilitas yang belum lancar sehingga pertumbuhan pencapaian komponen AMH dan RKS berjalan lambat. Selain itu masalah pendidikan di Sulawesi Tengah adalah kekurangan tenaga pengajar dan sarana pendidikan yang menunjang proses belajar mengajar itu sendiri. Dampak dari rendahnya APS, AMH, serta RLS mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tengah. Angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga Sulawesi Tengah berada dalam ekonomi dengan produktivitas rendah. Provinsi Sulawesi Tengah perlu konsisten dalam meningkatkan APS, AMH, dan RLS sehingga penyelenggaraan layanan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Sulawesi Tengah.

Gambar 9
Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013

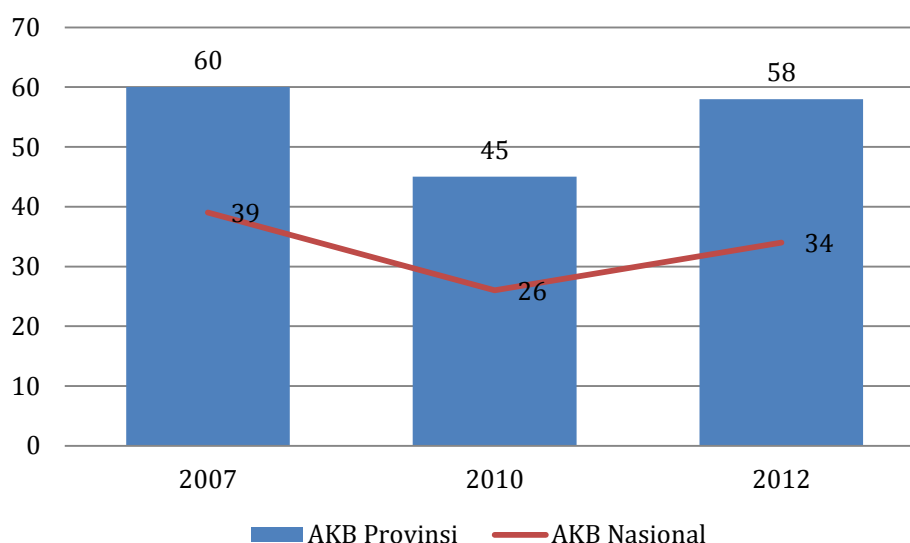


Sumber: BPS, 2013

2.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik sehingga segala aktivitas dapat dilakukan tanpa ada aktivitas yang terganggu. Tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk yang berada di atas nasional. Angka kematian bayi di Sulawesi Tengah pada tahun 2012 sebanyak 58 kematian per 1000 kelahiran baru, sedangkan angka nasional menunjukkan 34 kematian per 1000 kelahiran baru (Gambar 10). Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007, angka kematian bayi Sulawesi Tengah 60 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian balita mencapai 85 kematian per 1000 kelahiran hidup atau meningkat dari kondisi tahun 2007 sebesar 50 kematian per 1000 kelahiran hidup. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Tingginya nilai AKB suatu wilayah menunjukkan kesehatan di wilayah tersebut rendah. Faktor penyebab tingginya AKB di Sulawesi Tengah adalah penanganan persalinan yang kurang memadai, kondisi infrastruktur berupa jalan yang menjadi salah satu penyebab tingginya AKI, penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata, kesehatan lingkungan yang buruk, serta kurang informasi mengenai kesehatan itu sendiri.

Gambar 10
Angka Kematian Bayi Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: BPS, 2012

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengajukan program prioritas untuk percepatan pembangunan kesehatan di Sulawesi Tengah. Program prioritas pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah peningkatan sarana prasarana alat RS rujukan regional di RSUD Undata Kota Palu, RSUD Mokopido Kab. Toli-Toli, RSUD Anuntaloko Kab. Parigi Moutong, RSUD Luwuk Kab. Banggai, RSUD Morowali. Sarana pelayanan kesehatan yang banyak diakses masyarakat Sulawesi Tengah adalah puskesmas. Sampai akhir tahun 2014, jumlah pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah berupa puskesmas terbanyak berada di

Kabupaten Banggai, beserta unit perawatan yang tersedia, sementara jumlah terendah di Kabupaten Banggai Laut dan Morowali masing-masing memiliki 5 dan 9 puskesmas (Tabel 1). Mengingat luas wilayah Sulawesi Tengah dengan sebaran penduduk dan pelayanan kesehatan yang tidak merata, jarak antara pusat kesehatan masyarakat cukup jauh. Walaupun jumlah layanan kesehatan telah tersedia, namun aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat masih rendah. Masih banyak penduduk yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di puskesmas yang fasilitasnya juga belum tentu lengkap. Tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Sulawesi Tengah antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait risiko yang dihadapi pada suatu penyakit, belum optimalnya sistem informasi untuk menyusun kebijakan pelayanan kesehatan, terbatasnya sumber pendanaan untuk menanggulangi jenis penyakit tertentu, seperti TB paru, malaria, serta penyakit menular lainnya.

Tabel 1
Jumlah Puskesmas (Unit) Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Puskesmas	Puskesmas Perawatan	Puskesmas Non Perawatan
1	Kab. Banggai Kepulauan	10	4	6
2	Kab. Banggai	24	9	15
3	Kab. Morowali	9	6	3
4	Kab. Poso	21	10	11
5	Kab. Donggala	15	8	7
6	Kab. Toli-Toli	14	6	8
7	Kab. Buol	11	4	7
8	Kab. Parigi Moutong	21	11	10
9	Kab. Tojo Una-Una	13	6	7
10	Kab. Sigi	19	7	12
11	Kab. Banggai Laut	5	1	4
12	Kab. Morowali Utara	10	5	5
13	Kota Palu	12	1	11
Provinsi		184	78	106
Nasional		9731	3378	6336

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2014

Untuk masalah gizi buruk, Sulawesi Tengah termasuk wilayah yang retrans dan masuk dalam daerah dengan gizi buruk yang tinggi. Sebaran gizi buruk Tengah didominasi Kabupaten Donggala, Sigi, Banggai Kepulauan, dan Parigi Moutong. Gizi buruk bukan masalah suplai gizi saja tetapi karena faktor pendidikan, kultur, lingkungan, dan industrialisasi pangan juga mempengaruhi terjadinya gizi buruk. Kultur masyarakat Sulawesi Tengah mestinya mengkonsumsi makanan alami, akan tetapi pengaruh industri makanan berupa makanan siap saji yang merambah hingga ke desa sehingga ikut mempengaruhi pola makan.

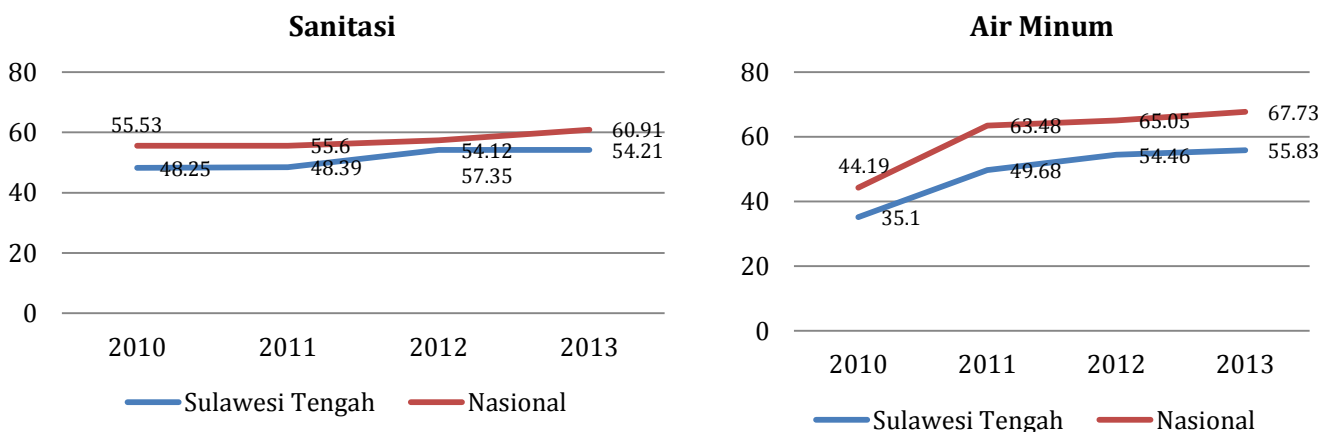
2.1.3. Perumahan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan perumahan juga semakin meningkat. Arah kebijakan pada sasaran pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau serta

didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kebutuhan rumah layak huni di Sulawesi Tengah sangat besar, mengingat masih banyaknya penduduk yang belum memiliki rumah yang layak ditempati, kepemilikan pemukiman yang belum tertata, serta terdapat keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah Sulawesi Tengah. Pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus.

Fasilitas perumahan yang memenuhi standar kesehatan adalah yang memiliki ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, sumber penerangan, dan bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak. Selama tahun 2010-2013 rumah tangga di Sulawesi Tengah yang mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, meskipun masih di bawah nasional (Gambar 11). Jumlah rumah tangga dengan kelayakan sanitasi di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat pada tahun 2010 ke tahun 2013, yaitu dari 48,25 persen menjadi 54,21 persen. Sementara itu jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Sulawesi Tengah selama 2010-2013 meningkat dari 35,1 persen menjadi 55,83 persen. Ketersediaan sanitasi layak untuk memenuhi rumah sehat juga semakin meningkat karena kesadaran masyarakat untuk hidup sehat juga semakin tinggi.

Gambar 11
Persentase Rumah Tangga Kriteria Kelayakan Sanitasi dan Air Minum



Sumber: BPS, 2013

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Upaya pemenuhan air bersih di Sulawesi Tengah diupayakan melalui peningkatan kapasitas produksi air bersih, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber bahan baku lainnya, serta pengoptimalisasian sistem distribusi air bersih khususnya di kawasan perkotaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk melayani kawasan perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Tengah dialokasikan pada satu wilayah pengembangan guna menunjang operasionalitas kegiatan perkotaan dan perdesaan. Arah pengembangan prasarana air bersih lebih difokuskan pada penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini belum terlayani jaringan air bersih di Sulawesi Tengah.

2.1.4. Mental/Karakter

Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan mandiri diperlukan sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki pendidikan yang baik, keahlian dan keterampilan, pekerja keras, memiliki etos kemajuan, bersikap optimis, serta memiliki nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai luhur yang penting ditanamkan untuk mencapai kemandirian tersebut antara lain gotong royong, toleransi, solidaritas, saling menghargai dan menghormati. Negara Indonesia merupakan negara majemuk dengan latar belakang budaya dan adat istiadat yang beragam. Pembangunan mental dan budaya masyarakat penting dilakukan untuk mendukung pembangunan fisik dan mengatasi permasalahan sosial.

Pembangunan karakter melalui pendidikan dalam masyarakat merupakan upaya meningkatkan sikap mental untuk meningkatkan nilai etis diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter mengacu pada kebiasaan berpikir, bersikap, berbuat dan memotivasi kehidupan seseorang. Karakter erat kaitannya pola tingkah laku dan kecenderungan untuk berbuat baik. Dalam hal ini perlu adanya usaha mengadakan pendidikan baik formal maupun informal di lingkungan tempat tinggal untuk menggerakkan perubahan yang terjadi. Pembangunan wilayah Sulawesi Tengah menuntut perubahan sikap mental manusia yang selain merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan juga merupakan salah satu tujuan utama pembangunan itu sendiri. Semua elemen masyarakat berperan serta dalam membangun karakter bangsa, di antaranya melalui media massa, pada akademisi, tokoh adat, dan melalui peran organisasi kepemudaan. Proses penanaman karakter yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah meliputi pengembangan bentuk pembelajaran substantif yang materinya terkait langsung dengan nilai, serta melalui pendidikan keagamaan. Peran lembaga adat juga dapat memberikan pemahaman tentang kearifan lokal yang memiliki nilai positif untuk pembangunan.

Pendidikan karakter di Sulawesi Tengah dapat mengambil dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal budaya setempat. Salah satu upaya membentuk karakter masyarakat di Sulawesi Tengah adalah melalui pembinaan karakter dasar di keluarga berdasarkan norma-norma agama. Pendidikan agama dalam masyarakat dan lingkungan sekolah juga menjadi dasar pada terbentuknya karakter masyarakat. Keberadaan tempat ibadah untuk pendidikan karakter masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan (Tabel 2) Pembentukan karakter bisa dilakukan melalui pemuka agama dan penyuluh agama di Sulawesi Tengah.

Tabel 2
Data Umat, Tempat Ibadah, Penyuluh Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014

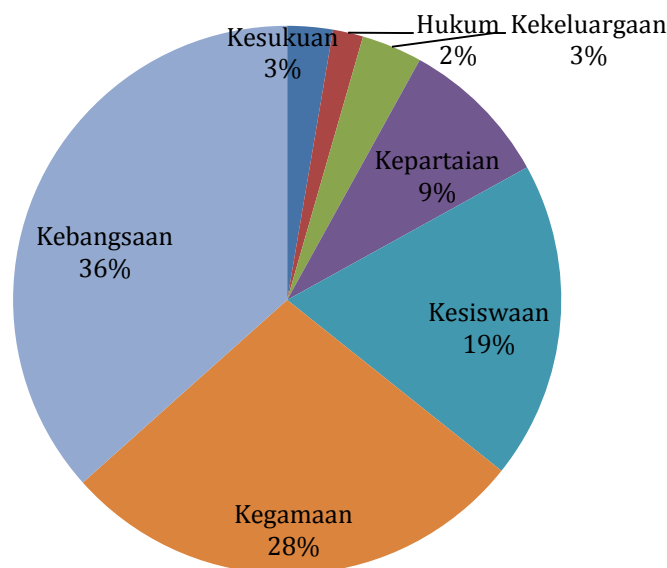
Agama	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
Jumlah Umat	2.066.754	490.379	33.254	133.632	16.125
Tempat Ibadah	3826	2022	125	252	10
Penyuluh Agama	1.858	310	18	66	32

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Sulawesi Tengah 2015

Pengembangan mental dan karakter bangsa membutuhkan peran serta masyarakat baik melalui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, serta organisasi kemasyarakatan. Untuk menjamin kesejahteraan sosial keterlibatan pemuda diperlukan untuk mendorong proses pembelajaran serta membangun komitmen bersama dalam pembangunan. Pengembangan karakter pemuda dapat dilakukan melalui lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan karena keterlibatan pemuda dalam hal ini sangat tinggi. Jumlah organisasi di Sulawesi Tengah yang terdaftar pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 sebanyak 112 organisasi yang menjadi wadah aspirasi generasi muda dalam menjalankan aktivitas kepemudaan

(Gambar 12). Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan organisasi kepemudaan adalah adanya sifat dan karakter dari generasi muda yang tidak relevan dengan norma kehidupan masyarakat. Melalui peran organisasi-organisasi ini pengembangan karakter yang positif dapat dilakukan untuk menghindari masalah negatif dalam internal maupun eksternal organisasi. Pemuda memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun daerahnya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan karakter bersifat menanamkan kebiasaan dan hal yang baik. Melalui media sekolah, tempat ibadah, serta organisasi masyarakat kebiasaan langsung dipraktekkan.

Gambar 12
Bidang Organisasi di Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2014 (diolah)

2.2. ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

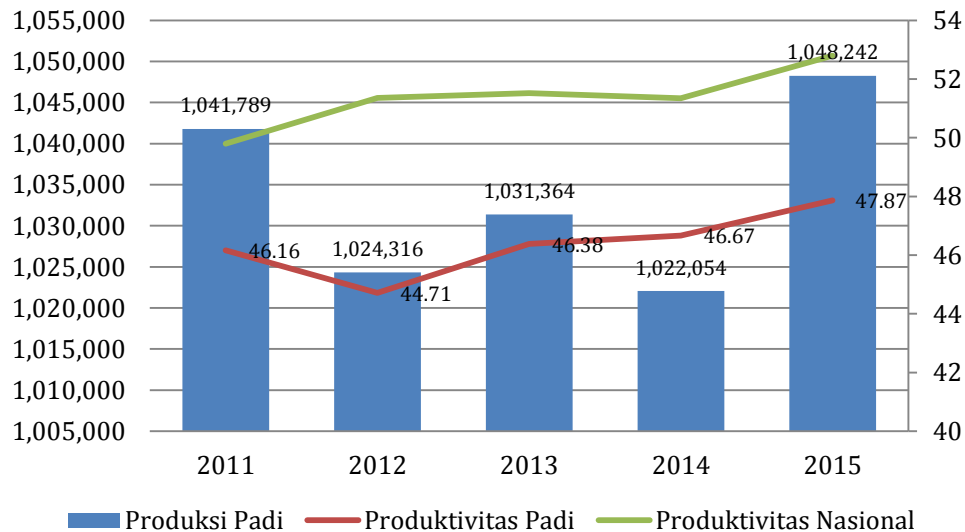
2.2.1. Pengembangan Sektor Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu stabilitas ekonomi sehingga upaya pemenuhan kecukupan pangan menjadi kerangka pembangunan yang mampu mendorong pembangunan sektor lainnya. Ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Tersedianya pangan secara fisik di daerah bisa diperoleh dari hasil produksi daerah sendiri, impor, maupun bantuan pangan. Analisis mengenai ketersediaan pangan dan akses pangan menjadi tahapan pembangunan yang strategis karena dibutuhkan untuk menelaah kinerja ketahanan pangan di Sulawesi Tengah. Kemandirian pangan akan mampu menjamin masyarakat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan tanpa ketergantungan dari pihak luar.

Sumber pangan lokal di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian yang dominan di Sulawesi Tengah. Produksi padi di Sulawesi Tengah mempunyai peran terbesar kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kecenderungan semakin meningkat. Produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015

mengalami peningkatan sebesar 26.188 ton dari tahun sebelumnya yaitu mencapai hasil produksi 1.022.054 ton pada tahun 2014 menjadi 1.048.242 ton pada tahun 2015 (Gambar 13). Perkembangan selama tahun 2012-2014 produksi padi sedikit menurun pada tahun 2013 sebesar 0,02 persen yang disebabkan menurunnya produktivitas atau faktor lainnya seperti serangan hama dan kekeringan. Kontribusi produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 sebesar 1,40 persen terhadap produksi padi Nasional. Kondisi ideal untuk menanam padi memberikan pengaruh yang cukup besar bagi komoditas yang lain. Pada saat lahan difungsikan untuk tanaman padi maka tanaman yang lain mengalami penurunan baik luas panen maupun produksinya. Pengelolaan pertanian hingga saat ini masih dikelola secara tradisional sehingga hasil produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim.

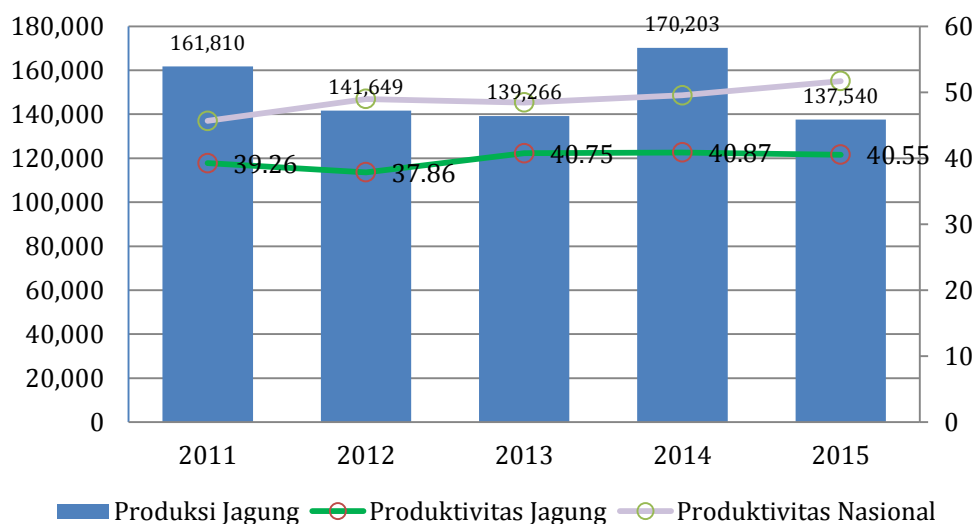
Gambar 13
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Padi Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: BPS, 2015

Sementara itu produksi jagung di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 mencapai 137.540 ton, turun sebesar 32.663 ton (19,19 persen) dari tahun 2014 sebesar 170.203 ton (Gambar 14). Dari tahun 2012 ke tahun 2014 produksi jagung terus mengalami peningkatan, kemudian kembali menurun tahun 2014, merupakan dampak dari bertambahnya luas panen untuk produksi yang meningkat, serta menurunnya luas panen untuk produksi yang menurun apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Untuk mendukung pencapaian target produksi jagung pemerintah berupaya untuk memperluas areal tanam dan penanaman benih jagung bermutu guna meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Sulawesi Tengah.

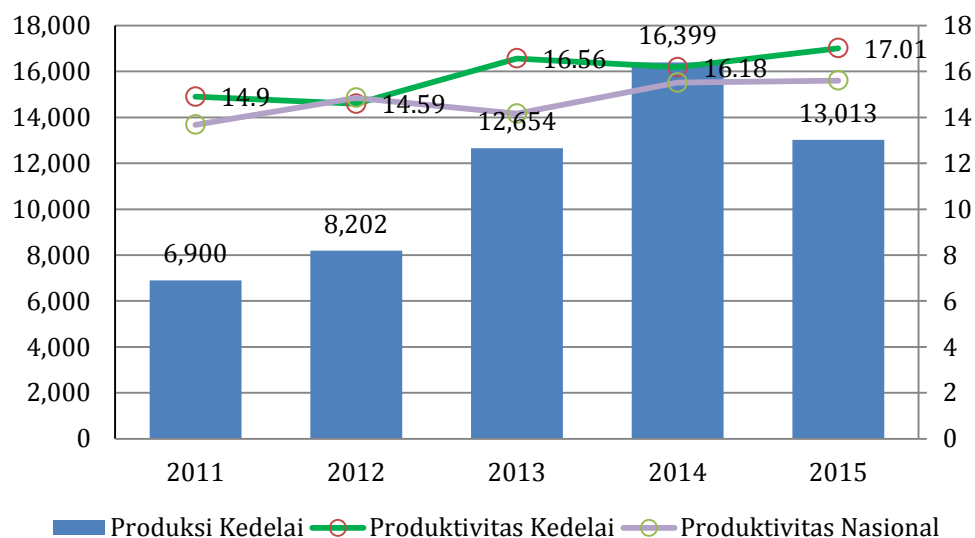
Gambar 14
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Jagung Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: BPS, 2014

Untuk komoditas kedelai, kontribusi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap nasional cenderung meningkat dari 1,62 persen pada tahun 2013, menjadi 1,71 persen pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,32 persen pada tahun 2015. Kedelai merupakan komoditas pangan utama selain jagung dan kacang makrena menjadi sumber protein nabati utama bagi masyarakat. Produksi kacang kedelai tahun 2014 di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan mencapai 99,93 persen pada tahun 2012 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 (Gambar 15)

Gambar 15
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Kedelai Provinsi Sulawesi Tengah

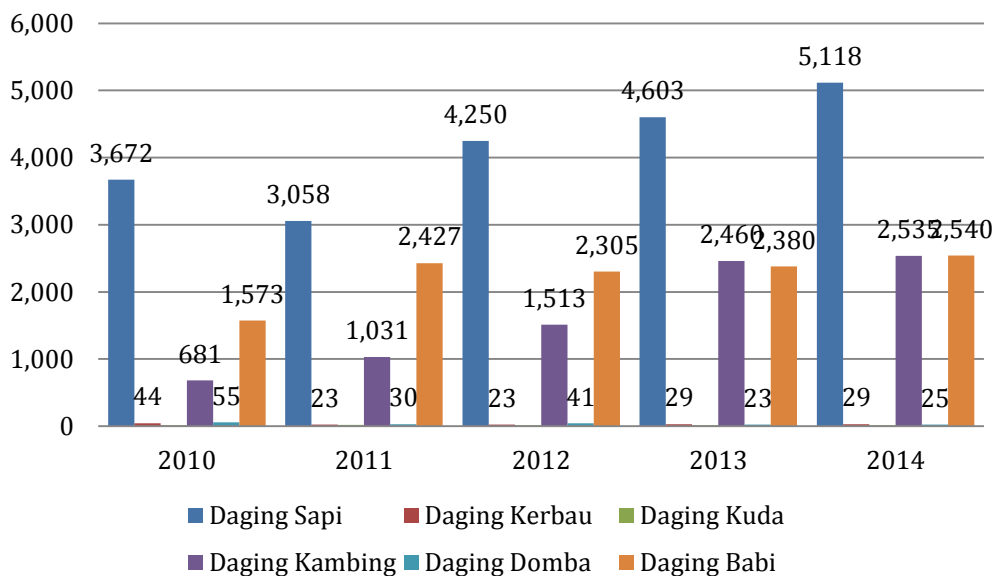


Sumber: BPS, 2014

Upaya meningkatkan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah dapat tercapai menurut perkembangan pada luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi komoditas tanaman padi, jagung dan kedelai. Namun tidak semua daerah di Sulawesi Tengah cocok untuk pengembangan jagung dan kedelai. Dalam hal ini perlu dilihat kembali jenis tanaman yang sesuai untuk dikembangkan di daerah tersebut sehingga terdapat komoditas pertanian lain yang mampu meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Kebutuhan bahan pangan selain bersumber dari pertanian juga berasal dari peternakan. Kebutuhan konsumsi daging di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dipenuhi secara lokal. Produksi daging Sulawesi Tengah didominasi oleh daging sapi, kambing dan babi dengan nilai produksi cenderung berfluktuatif (Gambar 16). Peningkatan populasi ternak diprioritaskan pada daerah padat ternak. Daerah sebaran ternak sapi terdapat di Kabupaten Donggala, Banggai, Parigi Moutong, dan Sigi. Untuk meningkatkan produksi daging dan juga populasi ternak dinas peternakan dan kesehatan hewan Sulawesi Tengah melakukan inseminasi buatan dan pola intensifikasi kawin alam. Selain itu juga digunakan sistem penggemukan yang dilakukan kelompok-kelompok petani yang tersebar di kabupaten di Sulawesi Tengah

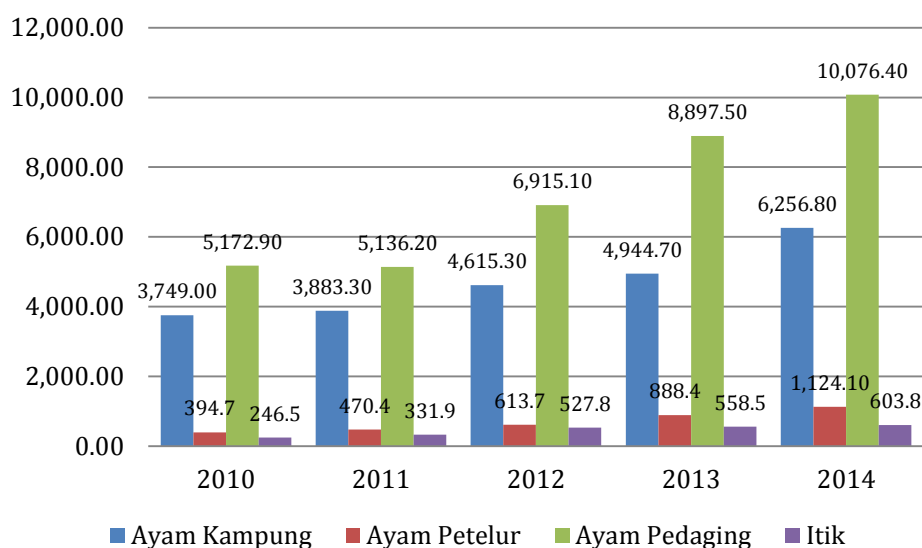
Gambar 16
Produksi Daging Provinsi Sulawesi Tengah (Ton)



Sumber: BPS, 2014

Peternakan unggas di Provinsi Sulawesi Tengah hasil produksinya tidak sebesar peternakan hewan besar. Populasi ternak unggas cenderung meningkat dengan jumlah populasi terbesar adalah pedaging. Jumlah populasi ayam pedaging tahun 2014 sebanyak 10 juta ekor, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebanyak 8,9 juta ekor (Gambar 17). Produksi daging dan telur yang dihasilkan juga tidak stabil walaupun pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Peningkatan produksi daging dan telur didukung adanya pemberian bantuan bibit ternak, bantuan pakan ternak, serta pengobatan ternak dari pemerintah.

Gambar 17
Populasi Ternak Unggas Provinsi Sulawesi Tengah (Ribuk Ekor)



Sumber: BPS, 2014

Tercapainya kondisi ketahanan dan kemandirian pangan di Provinsi Sulawesi Tengah juga dipengaruhi adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan usaha tani tanaman pangan, usaha tani hortikultura, usaha peternakan, dan usaha perkebunan yang mampu memberikan dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani dan peternak. Potensi lahan yang dapat dibuka menjadi lahan pertanian baru juga sangat besar di Sulawesi Tengah, memungkinkan untuk pencetakan sawah guna meningkatkan produksi tanaman pangan. Upaya perluasan areal sawah sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan karena kebutuhan produksi tanaman pangan khususnya padi terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan cukup luas setiap tahunnya. Untuk mendukung Sulawesi Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional diperlukan pembukaan lahan pertanian dalam memenuhi target produksi tanaman pangan di tahun 2019 (Tabel 3).

Tabel 3
Sasaran Kedaulatan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Desa Mandiri Benih *)	Cetak Sawah (Ha)	Target Produksi 2019 (ribu ton)			
		Padi	Jagung	Kedelai	Daging Sapi dan kerbau
30	75.500	1.292.230	241.525	38.547	6.045

*) indikasi awal

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2015

Dalam pemanfaatan dan pengolahan lahan sawah petani perlu mendapatkan pembinaan dan didampingi secara intensif baik dalam pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen oleh penyuluh pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi spesifik lokasi. Dinas pertanian perlu memantau penyaluran benih dan pupuk agar lahan sawah bisa

dusahakan secara berkelanjutan sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Petani juga perlu mendapatkan fasilitas berupa kemudahan dalam mengakses sarana produksi, sumber permodalan, pengolahan hasil serta pemasaran untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahterannya.

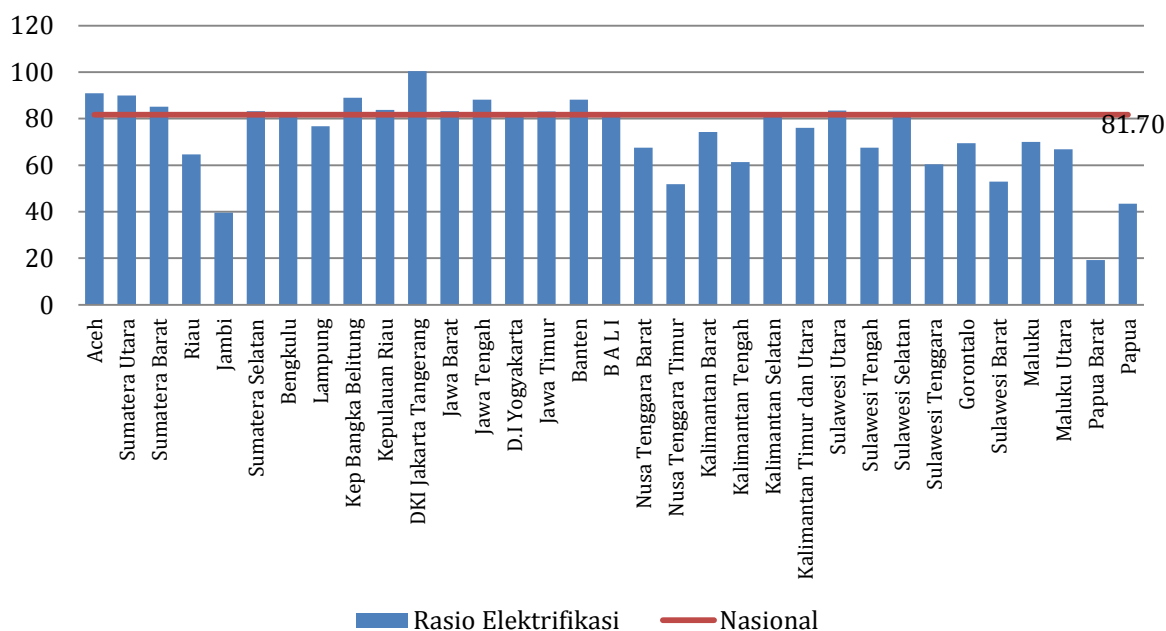
Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.

2.2.2. Pengembangan Sektor Energi

Sumberdaya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara termasuk Indonesia telah mulai memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil yang cadangannya mulai menipis. Tidak seperti negara-negara maju, pengembangan EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum dominan karena masih didominasi penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan energi terbarukan di Indonesia masih di bawah 50 persen, dengan kontribusi terbesar pada pemanfaatan tenaga air.

Potensi energi di Sulawesi Tengah berupa sumber daya mineral dan sumber energi terbarukan yang berasal dari air dan tenaga surya. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki cadangan dfelspar dengan potensi cadangan mencapai 71.211.000 m³ dan batubara dengan ketebalan 0,3-0,1 meter dimana pada ketebalan 0,15-3,0 meter sebarannya mencapai sekitar 15 Ha. Cadangan minyak dan gas bumi diketahui terdapat di dua Kabupaten yaitu, di Lapangan Tiaka Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali dan Kecamatan Tolli Barat Kabupaten Banggai dengan kapasitas 16,5-23 juta barel per tahun dan potensi gas bumi terdapat di Senaro Kecamatan Taili Kabupaten Banggai dengan kapasitas 1,6 triliun kaki kubik. Potensi sumber daya energi yang memanfaatkan EBT meliputi sumber daya air yang cukup besar yang selanjutnya dikembangkan menjadi sumber energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) baik skala kecil (total 804,8 Mw), menengah (total 28,564,12 Mw) maupun besar (total 714,8 Mw). Pasokan listrik juga dihasilkan melalui Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), masing-masing memiliki kapasitas sebesar 1.650 Kw dan 2-3 m/s.

Gambar 18
Rasio Elektrifikasi (%) Tahun 2014



Tidak termasuk pelanggan non PLN

Sumber: Statistik PLN, 2014

Sulawesi Tengah memiliki banyak potensi sumber energi, terutama renewable energy, seperti Air, Gas dan juga Panas Bumi yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber penghasil listrik. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik. Rasio elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014 masih di bawah 100 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 81,70 persen (Gambar 18). Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga (RUPTL PLN 2015-2024). Rasio elektrifikasi ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Saat ini PLN memiliki 3 area pelayanan yang melakukan fungsi pelayanan kelistrikan di Sulawesi Tengah, yaitu PLN Area Palu, PLN Area Toli-toli dan PLN Area Luwuk. Untuk mencapai peningkatan rasio elektrifikasi 70 persen maka PLN akan melayani penyambungan listrik bagi sekitar 50 ribu pelanggan baru di seluruh Sulawesi Tengah. Wilayah Pulau Sulawesi Tengah secara keseluruhan memiliki rasio elektrifikasi yang rendah karena luas wilayahnya dan jarak antarrumah tangga cukup jauh. Faktor yang mempengaruhi tingkat kebutuhan tenaga listrik adalah pertumbuhan PDRB, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan daerah. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kebutuhan energi listrik seiring dengan berjalannya pembangunan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan wilayahnya, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan listrik.

2.2.3. Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan

Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Sasaran pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diantaranya termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut

dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitas laut. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, wilayah dengan potensi maritim besar perlu didorong untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi kelautan. Laut Sulawesi Tengah memiliki akses yang sangat strategis ke Malaysia dan Filipina karena dekat dengan Pelabuhan Pantoloan dan Parigi yang merupakan akses ke Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, dimana setiap tahun dilayari 6.400 kapal besar per tahun untuk jalur Australia Barat ke Asia Timur.

Kondisi geografis Sulawesi Tengah yang sebagian besar wilayahnya terletak di daerah pantai menungkingkan armada laut beroperasi dari dan ke pelabuhan yang ada di setiap kabupaten, guna menunjang kelancaran kegiatan perekonomian ataupun sebagai penunjang transportasi angkutan laut. Pengembangan ekonomi berbasis kelautan menjadi fokus utama kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah memiliki 18 buah pelabuhan yang tersebar di kabupaten dan kota. Pelabuhan utama terdapat di Pantoloan (Kota Palu), Donggala (Kab. Donggala), dan Toli toli (Kab. Toli toli). Sekain itu terdapat 15 pelabuhan yang tidak diusahakan namun memiliki aktivitas pelabuhan yang cukup besar (Tabel 4). Perkembangan pelayanan transportasi laut di Sulawesi Tengah mencakup penyediaan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran dan pengembangan armada pelayaran nasional baik pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran khusus dan pelayaran samudra.

Tabel 4
Aktivitas Pelabuhan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014

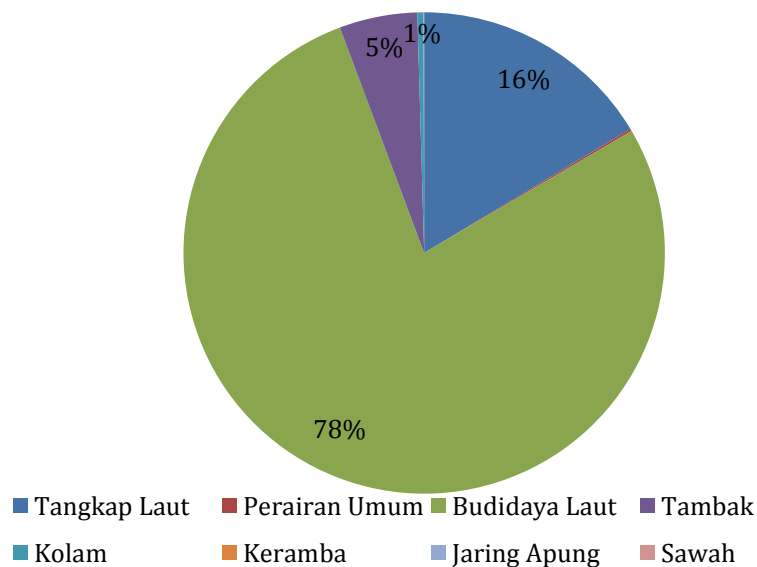
Kabupaten	Barang (ton)		Penumpang (orang)	
	Bongkar	Muat	Datang	Berangkat
Pantolan	302.634	33.603	15.677	22.413
Donggala	9.009	4.182	-	-
Toli toli	117.833	116200	6.848	6.230
Banggai	50.184	15.263	44.674	46.158
Salakan	1.681	2.594	56.138	54.785
Bunta	-	10.174	-	-
Pagimana	8.318	18.205	25.585	41.943
Luwuk	548.452	327.379	136.578	117.859
Kolodedale	26.912.725	39.835.491	18.646	19.514
Poso	76.451	40	403	720
Ogoamas	4.160	1.692.448	-	-
Wani	333.972	1.312.818	-	-
Leok	46.565	73.745	25	18
Parigi	8.163	-	-	-
Moutong	49.144	581	2	-
Ampana	20.723	29.703	25.731	42.688
Wakai	622	553	21.466	15.812
Dolong Popoli	256	391	14.921	14.732

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2015

Di sektor perikanan dan kelautan mempunyai potensi yang sangat besar karena luas perairan lautnya yang cukup besar dan diharapkan pengelolaan potensi tersebut dapat menciptakan industri berbasis perikanan yang terus tumbuh dan berakibat pada peningkatan

nilai pendapatan daerah. Sebagian besar produksi perikanan di Provinsi merupakan perikanan budidaya laut dengan hasil produksi tahun 2013 sebesar 1.234.021 ton (Gambar 19). Potensi unggulan yang dapat dikembangkan dari sektor perikanan dan kelautan ini antara lain : udang, tuna, cakalang, kerapu, teripang, lajang dan rumput laut. Wilayah pengembangan potensi udang terdapat di 6 (enam) kabupaten yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) cluster yaitu Parigi Moutong dan Banggai. Pengembangan potensi tuna terdapat di 6 (enam) kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang difokuskan pada 3 (tiga) cluster yaitu Donggala, Banggai dan Parigi Moutong. Untuk potensi unggulan rumput laut sendiri dikembangkan di 10 (sepuluh) kabupaten dan kota yang terfokus pada 3 (tiga) cluster yaitu Parigi Moutong, Toli-toli dan Banggai Kepulauan.

Gambar 19
Produksi Perikanan (ton) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013



Sumber: BPS, 2013

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Sulawesi Tengah antara lain belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya, dan penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis kelautan ini antara lain pemberian kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produk perikanan di pasar lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal dari produk olahan ikan. Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

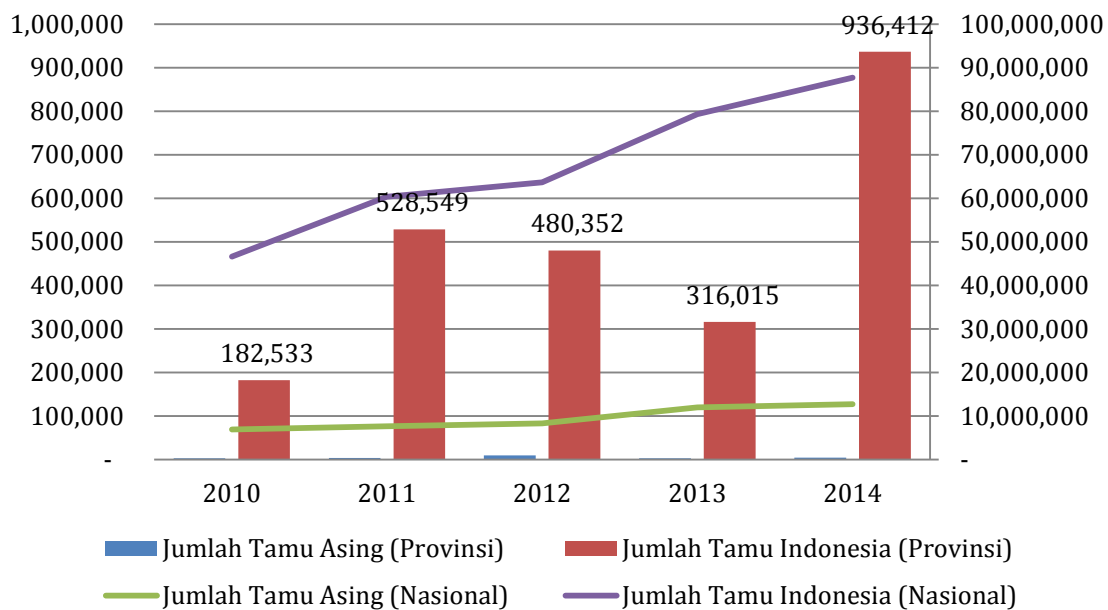
2.2.4. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri

Sektor pariwisata dan industri merupakan salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan pariwisata dan industri harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi: pemasaran pariwisata nasional dengan

mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri; pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor industri meliputi pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa, penumbuhan populasi industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Sulawesi Tengah belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Sulawesi Tengah meningkat setiap tahunnya walaupun peningkatan jumlah kunjungan tersebut dianggap tidak signifikan. Hal ini juga terlihat dari jumlah tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah dibandingkan Indonesia secara keseluruhan Tahun 2010-2014 (Gambar 20).

Gambar 20
Jumlah Tamu yang Menginap Tahun 2010-2014



Sumber: BPS, 2014

Jumlah tamu asing dan domestik pada hotel dan akomodasi lain di Sulawesi Tengah tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 194,92 persen dari tahun sebelumnya yaitu dari 318.916 orang di tahun 2013 menjadi 940.564 orang di tahun 2014. Dari jumlah tersebut kunjungan wisata asing rata-rata sebanyak 4.500 orang dalam setahun. Kurang berkembangnya pariwisata di Sulawesi Tengah karena belum adanya pengembangan kepariwisataan yang ditata dengan baik di wilayah ini. Kendala pengembangan pariwisata meliputi akses seperti jalan menuju objek wisata serta sara dan fasilitas untuk para wisatawan yang berkunjung. Fasilitas objek wisata di Sulawesi Tengah hingga saat ini belum ada yang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sulawesi Tengah memiliki banyak keanekaragaman hayati yang tinggi berupa

sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan maupun di perairan, memiliki keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentangan alam, gejala alam seperti terbentuknya pusat laut, peninggalan sejarah dan budaya berupa patung-patung megalitikum. Selain sebagai media pendidikan dan pelestarian lingkungan, obyek wisata ini merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi.

Upaya pengembangan pariwisata di Sulawesi Tengah didasarkan pada potensi yang dimilikinya. Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi *multiplier effect* untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain. Objek wisata yang dimiliki Sulawesi Tengah belum ditata dengan baik menjadi daya tarik wisata unggulan, padahal potensinya sangat besar karena alam yang dimiliki masih asli dan memiliki budaya asli Sulawesi Tengah.

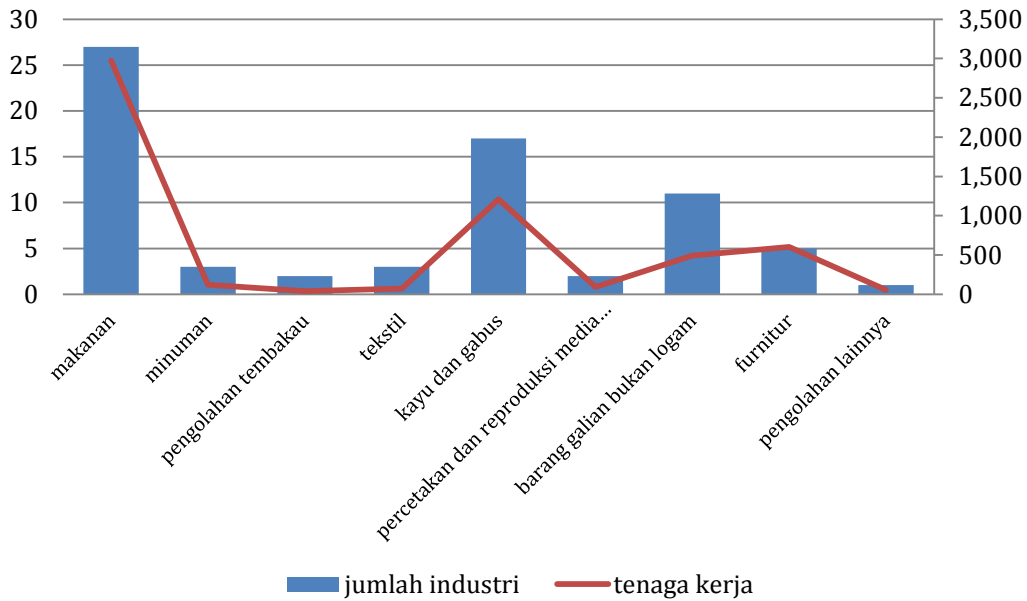
Untuk sektor industri, salah satu tantangan yang dihadapi industri nasional saat ini adalah daya saing yang rendah di pasar internasional. Faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing tersebut antara lain adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih lemahnya keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah), adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antardaerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu.

Sektor industri Sulawesi Tengah berkontribusi sebesar 6 persen terhadap pembentukan walaupun mengalami peningkatan nilai tambah pada tahun 2014. Pertumbuhan ini didukung oleh adanya peningkatan aktivitas dan produksi semua subsektornya. Potensi sumberdaya alam Sulawesi Tengah yang besar dalam perekonomian harus berimbang pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri, seperti keberadaan industri rakyat karena keberadaan industri menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dianggap maju jika kelompok sektor sekunder menjadi penopang bingkai perekonomiannya. Sektor industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang diharapkan peranannya semakin meningkat dalam perekonomian daerah maupun nasional. Jumlah perusahaan industri manufaktur besar dan sedang di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2009 sampai tahun 2013 cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2011-2012 tampak stagnan terhadap tahun sebelumnya. Jumlah perusahaan industri manufaktur besar dan sedang di Sulawesi Tengah cenderung meningkat jumlahnya jumlah, yaitu dari 70 perusahaan tahun 2012 menjadi 80 perusahaan tahun 2013. Namun demikian antar golongan industri terjadi penambahan maupun pengurangan jumlah perusahaan di beberapa golongan industri besar dan sedang.

Sektor industri usaha mikro, kecil, dan menengah perannya tidak begitu besar dalam pembentukan ekonomi Sulawesi Tengah, namun berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan di provinsi ini (Gambar 21) Pelatihan dan ketrampilan berwirausaha perlu diberikan kepada masyarakat di wilayah ini untuk meningkatkan daya saing saat memiliki industri mandiri. Pada tahun 2013 jumlah industri manufaktur terbesar adalah industri makanan dan minuman (Gambar 22). Industri makanan sebanyak 27 perusahaan atau sebesar 38 persen dari total perusahaan industri manufaktur besar sedang. Sementara golongan industri lainnya yang juga potensi di daerah ini adalah perusahaan industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga yang terbuat dari kayu (tidak termasuk furnitur) dan barang-barang anyaman yakni sebanyak 17 perusahaan atau 24 persen dari seluruh perusahaan industri manufaktur besar dan sedang.

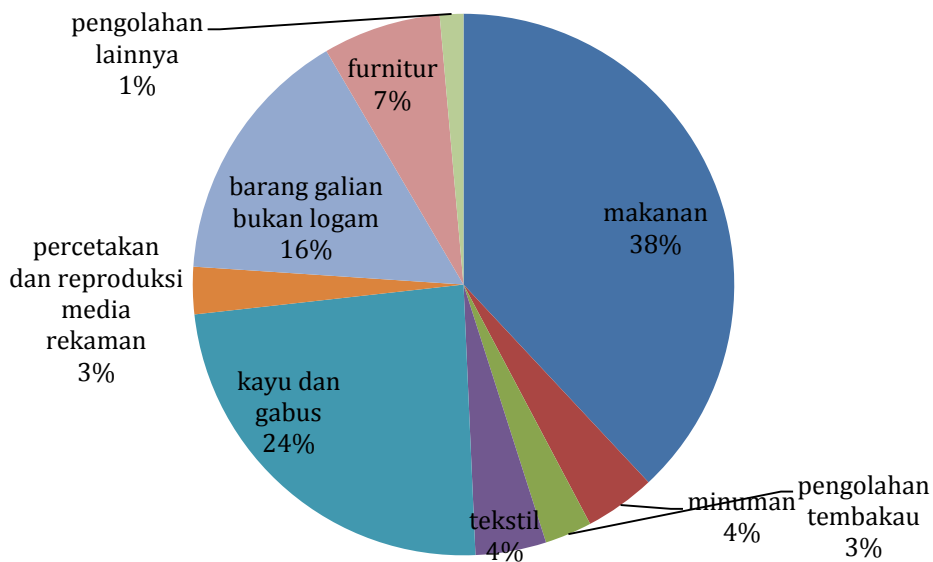


Gambar 21
Jenis Industri Manufaktur dan Tenaga Kerja Tahun 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2015

Gambar 22
Persentase Jumlah Industri Manufaktur



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2014

Pembangunan sektor industri di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor di bidang jasa, manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan jenis usaha tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil rakyat, antara lain kualitas SDM



bidang usaha kecil dan mikro yang masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat lokal yang rendah, modal usaha yang belum tersedia, kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan UKM, serta strategi pemasaran terhadap jenis usaha belum tersedia. Peran pemerintah terhadap industri kecil dan mikro adalah bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.

2.3. ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2.3.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan wilayah banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah juga bisa digunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. Hierarki kota dapat menentukan jenjang pelayanan terkait dengan pusat pelayanan di kota.

2.3.1.1. Kawasan Ekonomi Khusus

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang mencakup dalam wilayah hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Daerah yang ditetapkan menjadi KEK di Sulawesi Tengah adalah KEK Palu, dengan potensi pengembangan pada komoditas unggulan pertambangan mineral nikel, bijih besi, dan emas; agroindustri kakao, karet, rumput laut, rotan; serta logistik.

KEK Palu luasnya 1500 hektar, dengan kegiatan utama pada industri manufaktur, pengolahan tambang, serta industri agro. Pengembangan industri manufaktur meliputi *assembling volvo*, *assembling sino truck*, peningkatan lokal konten, serta *electricity product*. Untuk industri pengolahan tambang yang akan dikembangkan adalah pengolahan dan pemurnian bijih besi, emas, nikel, dan galena, serta industri metalurgi dan turunannya. Untuk mendukung hasil produksi perkebunan dan kelautan di Sulawesi Tengah keberadaan industri agro yang meliputi pengolahan rumput laut, pengolahan rotan, dan pengolahan kakao juga menjadi salah satu pengembangan KEK Palu.

Infrastruktur dalam kawasan sudah mulai dibangun. Pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan PT SMI Tunggal Jaya dalam penyusunan Materplan KEK Palu, yang dibantu oleh pihak konsultan dari Korea Selatan. Pembebasan lahan tahap I seluas 72 hektar untuk KEK Palu sudah selesai dilakukan, begitu juga dengan pembangunan kantor administrasi di dalam kawasan. Pembiayaan pembangunan pintu gerbang kawasan dan fasilitas perkantoran dan pengelola bersumber dari Kementerian Perindustrian. Sejalan dengan pembangunan infrastruktur dalam kawasan, pembangunan infrastruktur wilayah juga dikembangkan untuk mempermudah akses menuju kawasan. Terdapat pembangunan jalan sepanjang 5,5 km dengan konstruksi beton menuju lokasi yang saat ini masih dalam proses pembebasan lahan. Untuk penyediaan gas di KEK Palu pemerintah telah bekerja sama dengan PT Pertamina dalam memenuhi kebutuhan infrastrukturnya.

Pengembangan kegiatan ekonomi di KEK Palu erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah dengan strategi sebagai berikut:

1. Menyiapkan kawasan industri KEK Palu sebagai sentra industri pengolahan komoditas unggulan pertambangan mineral nikel, biji besi dan emas; agroindustri kakao, karet, rumput laut, rotan; industry manufaktur alat berat, otomotif dan elektrik; serta logistik
2. Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahan pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan yang berorientasi ekspor
3. Mengembangkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan secara terpadu
4. Meningkatkan produktivitas hasil olahan pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan di dalam dan sekitar kawasan industri
5. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas

2.3.1.2. Kawasan Industri

Kawasan Industri (KI) bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Arah pengembangan KI di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sistem logistik dan KI sebagai pergerakan utama pusat-pusat pertumbuhan baru. KI di Sulawesi Tengah terletak di Palu dan Morowali (Tabel 5).

Tabel 5
Kawasan Industri di Sulawesi Tengah

Kawasan Industri	Palu	Morowali
Lokasi	Kec. Tawaeli Palu	Kec Bahodapi Morowali
Luas Lahan	1500 hektar	1200 hektar
Basis Industri	Rotan, rumput laut, kakap, dan mineral	Inegrated Ferronikel, stainless steel dan produk hilirnya
Nilai Investasi	Rp. 12,5 T	Rp. 49,7 T
Penyerapan T.K	165.000 tahun 2035	80.000 tahun 2035
Pengelola Kawasan	PT Bangun Palu Sulteng	Tsinghang Industrial Morowali Industrial Park

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Perkembangan KI Palu saat ini sudah terdapat pembangunan konstruksi pabrik industri karet dan minyak atsiri, sudah terbangun infrastruktur jalan menuju kawasan, dan tersedianya interkoneksi jaringan listrik Sulawesi di kawasan ini. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KI Palu meliputi belum terselesaikannya pembenasan seluruh lahan sesuai kebutuhan masterplan, belum terdapat infrastruktur jalan di dalam kawasan. Ketersediaan air baku belum ada, serta belum adanya jalan layang dari kawasan menuju pelabuhan. Aksi yang harus dilakukan pemerintah adalah fasilitasi pembangunan infrastruktur dan melakukan koordinasi.

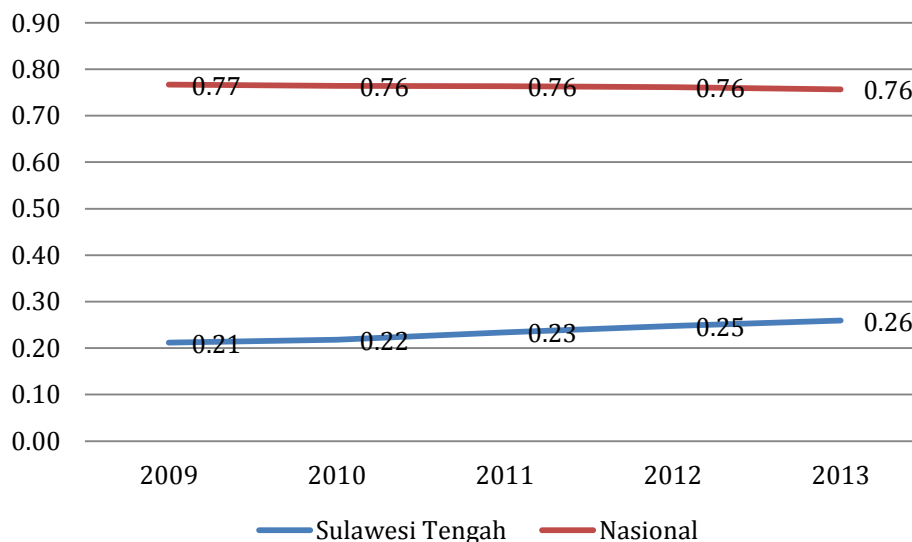
Untuk KI Morowali, lahan seluas 1200 hektar telah dikuasai oleh pengelola KI dan pembangunan pelabuhan serta bandara sedang dalam proses perijinan. pabrik ferronikel tahap I telah beroperasi dengan kapasitas 300.000 ton per tahun dan telah dilakukan pemancangan dan

konstruksi tahap dasar untuk Tahap II dengan kapasitas 600.000 ton per tahun. Untuk mendukung ketersediaan sumber energi di KI Morowali pembangunan powerplant 65x2 MW sudah mencapai 90 persen. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KI Morowali antar lain kurangnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia lokal serta belum tersedianya rumah sakit tipe C dan perumahan untuk tenaga kerja. Kebutuhan infrastruktur yang belum tersedia di KI Morowali adalah instalasi air baku 16.500 liter per detik dan transmisi listrik menuju kawasan industri.

2.3.2. Kesenjangan intra wilayah

Pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antargolongan pendapatan. Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 memiliki kecenderungan semakin meningkat walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional (Gambar 23). Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Tengah berkategori rendah. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Sulawesi Tengah adalah rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Gambar 23
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 6). Kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki PDRB per kapita tinggi meliputi Kabupaten Banggai Laut, Morowali, dan Kota Palu; yang disebabkan karena berkembangnya sektor industri pengolahan dalam perekonomian yang mengolah sumberdaya alam menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah.

Tabel 6

**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008-2013 (000/jiwa)**

Kab/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Banggai Kepulauan	6.788	7.682	8.684	9.823	11.028	12.199
Banggai	9.076	10.703	12.814	15.523	19.024	23.580
Morowali	13.583	14.732	17.964	22.940	27.657	28.120
Poso	8.882	9.087	10.189	11.489	12.976	14.665
Donggala	10.789	11.722	13.462	15.345	17.676	20.431
Toli-Toli	9.789	11.209	12.722	14.320	16.253	18.548
Buol	7.874	8.785	9.850	11.128	12.630	14.340
Parigi Moutong	12.142	13.570	15.225	17.122	19.246	21.679
Tojo Una-una	6.625	7.718	8.704	9.889	11.223	12.754
Kab sigi	-	12.988	14.595	16.555	18.859	21.349
Kab. Banggai Laut		-	-	-	-	37.519
Kab. Morowali Utara		-			-	12.487
Kota Palu	14.257	16.076	18.182	20.732	23.655	27.305
Sulawesi Tengah	11.302	12.501	14.102	16.456	18.657	21.052

Sumber: BPS, 2013

3. ISU STRATEGIS WILAYAH

Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang memiliki kriteria yaitu: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Berdasarkan gambaran kinerja pembangunan wilayah, analisis pembangunan, serta identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, maka isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian)

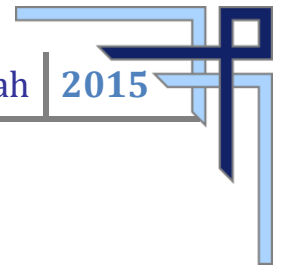
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah agraris yang sebagian besar kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 2014 sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Sulawesi Tengah, diikuti sektor konstruksi serta pertambangan dan penggalian (Tabel 7). Beberapa potensi wilayah seperti perkebunan (kaka, kelapa sawit, rotan), pertanian, perikanan, dan kelautan merupakan modal utama Sulawesi Tengah untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Walaupun sektor pertanian merupakan sektor dengan proporsi terbesar dalam perekonomian, namun laju pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan sektor lain, kemungkinan disebabkan rendahnya produktivitas pertanian. Program pengembangan usaha pertanian dan kelautan di Sulawesi Tengah mengalami kemajuan namun petani masih menghadapi kendala, yaitu dalam hal peningkatan produksi dan pemasaran hasil panen.

Tabel 7
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2010
1.	Pertanian , Kehutanan, dan Perikanan	34,37	34,48
2.	Pertambangan dan Penggalian	9,69	10,23
3.	Industri Pengolahan	5,87	5,96
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,15	1,15
6.	Konstruksi	13,59	12,26
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,66	10,33
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,26	4,29
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,58	0,55
10.	Informasi dan Komunikasi	3,47	4,07
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,38	2,33
12.	Real Estate	2,07	2,15
13.	Jasa Perusahaan	0,28	0,29
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	6,78	6,29
15.	Jasa Pendidikan	4,39	41,7
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,50
17.	Jasa Lainnya	0,90	0,88
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2014

Apabila ditelusuri lebih lanjut berdasarkan analisis sektor basis, sektor-sektor yang dapat diperdagangkan antar daerah dengan nilai *location quotient* lebih besar dari satu ($LQ > 1$) adalah sektor pertanian kehutanan dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah; konstruksi; transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut (Tabel 8).



Tabel 8
Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,68	2,65	2,61	2,55	2,63
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,83	1,01	1,23	1,48	1,12
3.	Industri Pengolahan	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1,97	1,89	1,82	1,76	1,84
6.	Konstruksi	1,03	1,04	1,05	1,06	1,26
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,80	0,78	0,73	0,71	0,74
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,25	1,19	1,14	1,12	1,14
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18
10.	Informasi dan Komunikasi	0,96	0,92	0,91	0,87	0,88
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,68	0,72	0,67	0,64	0,63
12.	Real Estat	0,78	0,75	0,72	0,70	0,72
13.	Jasa Perusahaan	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,66	1,63	1,68	1,73	1,81
15.	Jasa Pendidikan	1,49	1,44	1,39	1,32	1,31
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,60	1,53	1,47	1,40	1,42
17.	Jasa lainnya	0,36	0,34	0,32	0,30	0,31

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2010

Sumber: BPS, 2014(diolah)

Sektor pertanian perlu dikembangkan untuk mendukung kedaulatan pangan sesuai dengan agenda prioritas pembangunan. Upaya mencapai kedaulatan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian sekaligus menggerakkan usaha industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. *Pertama*, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja.

Selama periode 2011-2015, perubahan jumlah orang yang bekerja di hampir semua sektor lapangan pekerjaan cenderung meningkat, kecuali pertambangan, industri pengolahan, listrik gas air (Tabel 9). Pada tahun sebelumnya jumlah tenaga kerja di sektor industri menunjukkan perubahan positif namun menurun pada tahun 2014. Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian dan jasa-jasa dengan yang kurang produktif.



Tabel 9
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2011-2015

No.	Lapangan Pekerjaan	2011	2015 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	654.739	701.354	46.615
2	Pertambangan	26.254	15.442	-10.812
3	Industri Pengolahan	65.750	59.777	-5.973
4	Listrik, Gas, Air	1.912	868	-1.044
5	Bangunan	57.492	75.713	18.221
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	206.094	231.002	24.908
7	Angkutan & Telekomunikasi	44.314	46.787	2.473
8	Keuangan	15.792	20.552	4.760
9	Jasa-Jasa	204.436	232.424	27.988
Total		1.276.783	1.383.919	107.136

Sumber: BPS, 2014

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2014 adalah pada konsumsi rumah tangga dengan kontribusi lebih besar dari 50 persen (Tabel 10). Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah berkontribusi sebesar 44,55 persen pada PDRB ADHB dan 13,77 persen pada PDRB ADHK 2010 sehingga perlu lebih ditingkatkan. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi.

Tabel 10
PDRB Menurut Penggunaan 2014

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2010
1.	Konsumsi Rumah Tangga	57,27	55,94
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,91	46,27
3.	Konsumsi Pemerintah	14,37	1,96
4.	PMTB	44,55	13,77
5.	Perubahan Stok	1,85	1,59
6.	Ekspor	5,30	5,46
7.	Impor	0,81	0,57
8.	Net Ekspor Antar Daerah	-24,45	-24,21
Total		100,00	100,00

Sumber : BPS, 2014

Sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah, kegiatan investasi perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi wilayah, meliputi sumber daya alam dengan kandungan mineral logam, sumber daya hutan dan perairan, pengembangan pertanian dan agribisnis, serta potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan

yang ramah dunia usaha. Pencapaian nilai tambah pada komponen investasi diantaranya dipengaruhi oleh pembenahan sarana infrastruktur, pengurusan perizinan usaha, kepastian hukum dan kondisi keamanan suatu daerah.

3. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Provinsi Sulawesi Tengah telah dilayani jaringan jalan sepanjang 18.790 km. Jika dilihat dari sisi kuantitas, ketersediaan jaringan jalan di Sulawesi Tengah untuk mendukung transportasi darat cukup memadai, dengan posisi berada di titik tengah jalur lalu lintas Sulawesi yang menghubungkan Makassar dan Manado. Hal ini terlihat dari indikator kerapatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen (Tabel 11).

Tabel 11
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2014

No.	Provinsi	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	136.407,58	1068,36
2	D.I Yogyakarta	21.873,72	136,19
3	Bali	29.666,48	133,20
4	Jawa Tengah	22.858,32	90,56
5	Jawa Timur	32.703,80	89,03
6	Banten	29.961,85	70,84
7	Sulawesi Selatan	27.760,65	69,98
8	Jawa Barat	24.961,05	69,55
9	Kepulauan Riau	76.753,11	60,40
10	Lampung	23.648,76	56,85
11	Sumatera Barat	25.963,24	54,57
12	Sumatera Utara	30.482,59	50,41
13	Sulawesi Utara	27.804,68	49,14
14	Nusa Tenggara Barat	15.351,54	43,52
15	Bengkulu	19.631,40	43,06
16	Gorontalo	18.627,37	42,76
17	Nusa Tenggara Timur	10.742,42	42,10
18	Sulawesi Barat	19.211,14	41,93
19	Aceh	23.199,49	39,86
20	Sulawesi Tenggara	27.898,88	31,32
21	Sulawesi Tengah	25.316,32	30,38
22	Kalimantan Selatan	27.230,80	30,16
23	Kep Bangka Belitung	32.868,70	29,62
24	Riau	72.331,01	28,27
25	Jambi	36.088,33	26,65
26	Maluku Utara	16.872,31	19,39
27	Sumatera Selatan	30.627,55	18,71

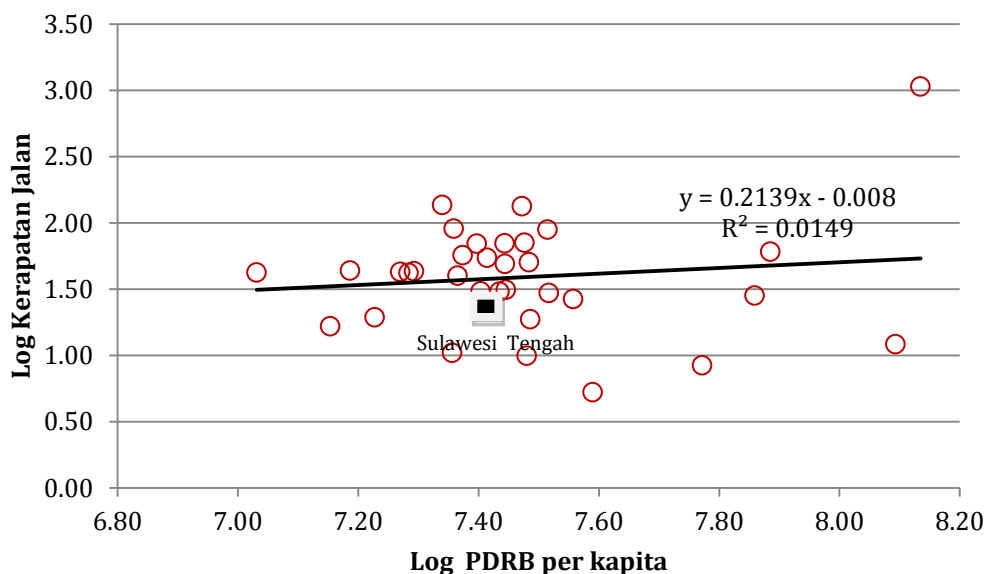
No.	Provinsi	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
28	Maluku	14.230,08	16,61
29	Kalimantan Timur	123.985,45	12,13
30	Kalimantan Barat	22.707,79	10,42
31	Kalimantan Tengah	30.220,97	9,93
32	Papua Barat	59.156,84	8,40
33	Papua	38.891,99	5,26

Sumber: BPS (2014)

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 24). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Sulawesi Tengah relatif belum baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia karena masih mengalami defisiensi infrastruktur jalan.

Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tengah belum cukup baik dan berada jauh dibawah rata-rata nasional. Kondisi ini mengurangi daya dukung pergerakan dan akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan serta meningkatkan biaya distribusi barang antardaerah, yang kan menghambat perekonomian daerah. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

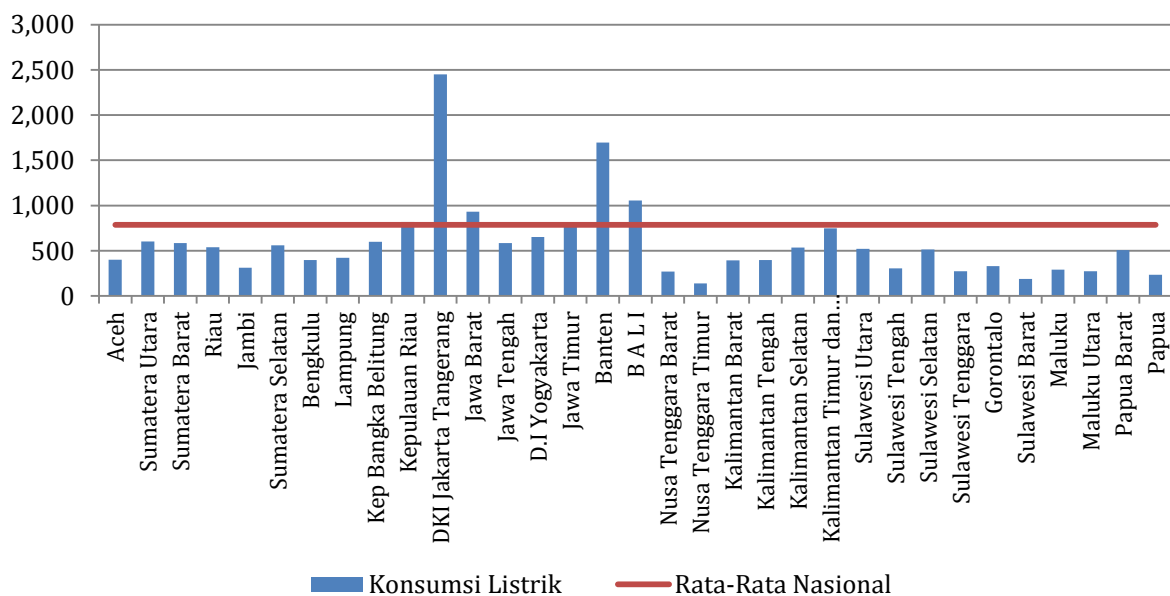
Gambar 24
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Tahun 2014



Sumber: BPS (2014) - diolah

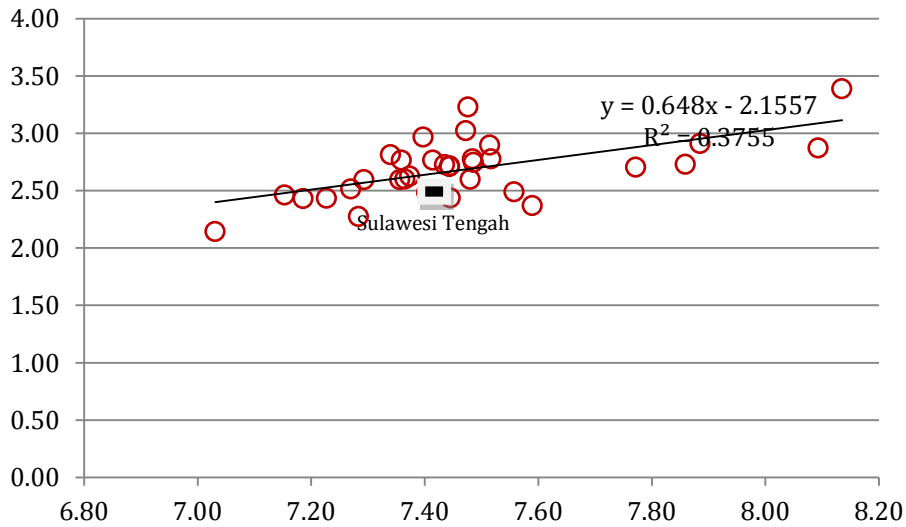
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Sulawesi Tengah termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 787,6 kWh (Gambar 25). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 26). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Sulawesi Tengah berada di bawah kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik Sulawesi Tengah jauh lebih rendah dari di provinsi lain yang memiliki pendapatan perkapita sama. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di Sulawesi Tengah.

Gambar 25
Konsumsi Listrik per Kapita (KWh) Tahun 2014



Sumber: Statistik PLN, 2014

Gambar 26
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2014

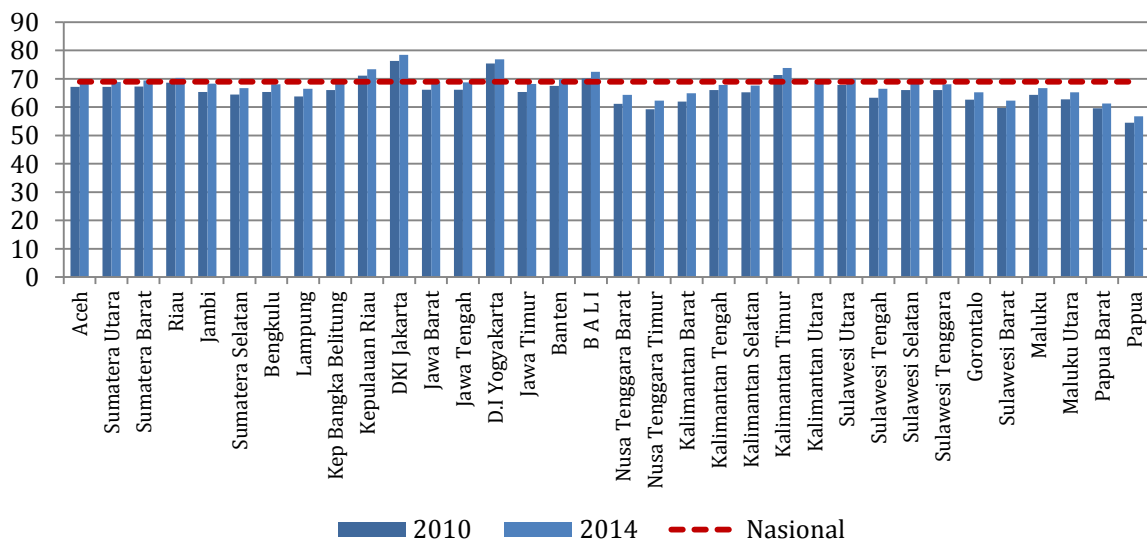


Sumber: BPS (2014), Statistik PLN (2014) - diolah

4. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2014 dibandingkan tahun 2010 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 68,9 (Gambar 27). Nilai IPM ini sudah menerapkan metode baru yang lebih merepresentasikan kondisi saat ini. Rendahnya nilai IPM di Sulawesi Tengah sejalan dengan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah ini yang salah satunya disebabkan karena kurangnya infrastruktur penunjang pendidikan.

Gambar 27
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2010 dan 2014



Nilai IPM menggunakan metode baru

Sumber: BPS, 2014

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Sulawesi Tengah dengan ijazah minimal SMA mengalami peningkatan dari 33,06 persen pada tahun 2012 menjadi 35,18 persen pada tahun 2015 (Tabel 12). Angkatan kerja dengan pendidikan SD dan SMP masih mendominasi angkatan kerja di Sulawesi Tengah dan masih menunjukkan peningkatan yang besar. Perbaikan kualitas angkatan kerja merupakan modal berharga untuk mendukung industrialisasi berbasis sumber daya alam setempat.

Tabel 12
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	2012	2015	Perubahan
1	≤ SD	698.845	652.316	-46.529
2	SMP	206.457	272.425	65.968
3	SMA (Umum dan Kejuruan)	298.151	356.475	58.324
5	Diploma I/II/III/Akademi	45.848	32.244	-13.604
6	Universitas	103.126	113.067	9.941
Total		1.352.427	1.426.527	74.100

Sumber: BPS, 2015

5. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Rasio pinjaman terhadap simpanan di Sulawesi Tengah nilainya lebih besar dari satu, menunjukkan potensi simpanan masyarakat di provinsi ini rendah atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Rasio tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,92, menunjukkan sumber permodalan masyarakat cukup memadai secara nasional (Tabel 13).

Tabel 13
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2014

Wilayah	Posisi Pinjaman di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Simpanan di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Sulawesi Tengah	24.342,28	13.948,85	1,75	2,88
Nasional	3.707.916,34	4.013.816,57	0,92	0,85

Sumber: Bank Indonesia, 2014

Rasio PMTB terhadap simpanan di Sulawesi Tengah nilainya lebih dari satu, menunjukkan investasi fisik di daerah mulai banyak dikembangkan. Percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah didukung oleh banyaknya infrastruktur fisik dibangun pemerintah maupun

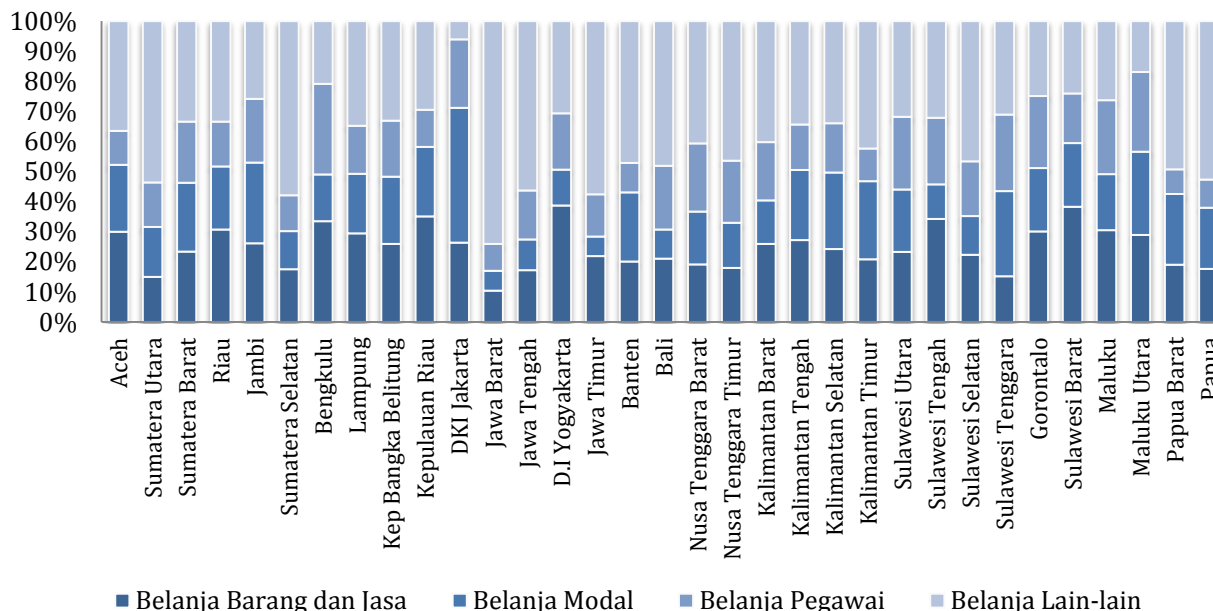
sektor swasta. PMTB biasa disebut investasi fisik karena dihitung dari penanaman modal yang benar-benar menghasilkan nilai tambah dan bukan dihitung dari realisasi penanaman modal yang tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

6. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten dan provinsi di Sulawesi Tengah. Rasio belanja modal di Sulawesi Tengah pada tahun 2014 sebesar 11,40 persen, dan rasio belanja pegawai sebesar 22,16 persen (Gambar 28). Kondisi ini belum cukup memacu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM secara tepat dan berkelanjutan, dengan alokasi alokasi anggaran yang memadai.

Gambar 28
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2014



Sumber: BPS, 2013

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan kualitas belanja daerah adalah rendahnya kualitas perencanaan daerah. Selain itu belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran daerah juga menjadi permasalahan yang umum di setiap daerah, yang diikuti oleh permasalahan lain seperti porsi terbesar APBD pada belanja tidak langsung dan bukan

pada belanja langsung. Faktor yang mempengaruhi kualitas belanja daerah antara lain sumberdaya manusia, sumberdaya alam, faktor kebijakan, dan komitmen dari pemerintah daerah itu sendiri untuk memprioritaskan kepentingan publik terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu kapasitas pemerintah dalam mengelola anggaran daerah akan menghasilkan belanja dan penganggaran yang berkualitas.

4. REKOMENDASI KEBIJAKAN

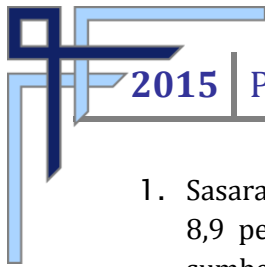
Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Salah satu agenda prioritas pembangunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pengembangan dunia usaha pertanian melalui pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspors hasil pertanian, dan program pengembangan SDM pertanian
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Peningkatan kualitas jaringan jalan dan irigasi;
- e. Peningkatan kapasitas/ suplai listrik wilayah
- f. Peningkatan akses pendidikan terutama pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan kualitas belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

5. PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Percepatan pengembangan ekonomi Sulawesi diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang besar dan beragam, mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan. Percepatan pengembangan ekonomi Sulawesi diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Sulawesi Tengah dijadikan simpul perkebunan kakao. Posisi Sulawesi Tengah yang strategis tepat di tengah pulau Sulawesi, mengindikasikan pentingnya peran Sulawesi Tengah dalam pergerakan arus barang. Selain proyek-proyek infrastruktur utama yang secara langsung melewati Sulawesi Tengah, proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan lainnya juga diperkirakan akan hanya memberi manfaat besar pada Sulawesi Tengah khususnya dalam membuka akses Sulawesi Tengah dengan Provinsi di Pulau besar lainnya. Namun demikian, hal ini sangat bergantung pada aksesibilitas wilayah Sulawesi Tengah dan konektivitasnya kota dengan pelabuhan yang menghubungkan Sulawesi dengan pulau besar Indonesia lainnya.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:



1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,6 – 8,9 persen dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2016 prospek pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia akan terus membaik namun risiko ke bawah masih ada. Potensi perlambatan ekonomi di KTI tertahan turut disumbangkan oleh membaiknya industri pengolahan di Sulawesi Tengah yang didukung oleh beroperasinya pabrik baru LNG dan smelter nikel. Beroperasinya pabrik baru ini relatif mampu menopang perekonomian di Sulawesi Tengah, didukung dengan pengembangan KEK Palu serta KI Palu dan Morowali. Kinerja sektor industri akan meningkat karena dpengoperasioan fasilitas baru yang mendukung hilirisasi di Sulawesi Tengah.
2. Kondisi terakhir kemiskinan Sulawesi Tengah tahun 2014 masih berada pada angka 13,93 persen, sementara itu sasaran dari buku III RPJMN di tahun 2019 adalah sebesar 13,7 – 9,7 persen, untuk itu diperlukan upaya lebih keras dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dan mencapai sasaran pengurangan tingkat kemiskinan sesuai Buku III RPJMN 2015-2019. Selama kurun waktu 2015-2019 Sulawesi Tengah harus menurunkan persentase penduduk miskin 4,23 poin persentase atau 0,85 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sarasan utama pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Sulawesi Tengah maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor sektor kehutanan dan perikanan.